



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN PATI
TAHUN 2021 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa visi Kabupaten Pati adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik;
 - b. bahwa selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati, maka visi *Smart City* Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati yang cerdas, maju, dan inovatif dalam pelayanan publik yang berwawasan lingkungan pada Tahun 2025;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pati, diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah yang disusun dalam bentuk Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati Tahun 2021 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konruen Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
17. Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN *MASTER PLAN SMART CITY* KABUPATEN PATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Masterplan adalah Rencana Induk Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Program dan Kegiatan;
7. *Smart City* adalah kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
8. Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

BAB II
SISTEMATIKA MASTERPLAN

Pasal 2

Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyesuaian program Perangkat Daerah dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 secara berkesinambungan untuk mewujudkan visi Kabupaten Pati.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan :

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Pati;
- b. sebagai pedoman pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Pati;
- c. sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Pati;
- d. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Pati dalam dokumen perencanaan *Smart City* Pati;
- e. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif dan partisipatif;
- f. menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah lainnya, instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
- g. menyelaraskan perkembangan dinamika masyarakat dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah pengampu kegiatan *Smart City*.

Pasal 4

- (1) Sistematika Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - A. BAB I PENDAHULUAN
 - B. BAB II VISI MISI *SMART CITY*
 - C. BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*
 - D. BAB IV RENCANA AKSI *SMART CITY*
 - E. BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY*
- (2) Rincian sistematika Masterplan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 Oktober 2021
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 23 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan suatu daerah khususnya di Kabupaten Pati, maka permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan juga semakin berkembang dan semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dengan cara yang biasa tentunya kurang tepat karena tidak seiring dengan perkembangan daerah. Untuk itu butuh suatu cara percepatan penyelesaian masalah dengan cara yang cerdas yang melibatkan Teknologi Informasi di dalamnya.

Selain untuk mempercepat dalam penyelesaian permasalahan, dibutuhkan juga kombinasi antara perencanaan daerah, peningkatan kualitas tata pemerintahan, teknologi yang inovatif, masyarakat yang lebih sejahtera dan bisnis yang berkembang untuk menghasilkan apa yang dikenal sebagai *Smart City*.

Menjadi *Smart City* juga berarti harus terus berinovasi dan berkembang dengan cara yang lebih baik. Selain investasi modal, diperlukan metode yang inovatif dan efisien dalam menemukan kebutuhan masyarakat yang tinggal, bekerja, atau bahkan hanya mengunjungi Kabupaten Pati.

Namun perlu dipahami bahwa konsep *Smart City* adalah konsep yang unik dan dinamis. Inisiasi-inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena *Smart City* menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sensor, dan *data analytic* sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*).

Pembangunan berbasis *Smart City* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lain. Jadi inisiasi *Smart City* yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut.

Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah kabupaten dan kota mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *Smart City* dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

Proses pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang memerlukan waktu dan tidak seketika. Diperlukan komitmen dan perencanaan yang matang serta menyeluruh. Pada tahap-tahap tertentu, usaha pembangunan *Smart City* juga perlu melibatkan semua pihak di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, baik dari pihak warga, pemerintah maupun swasta. Selain untuk mewujudkan terciptanya sinkronisasi, hal ini juga dimaksudkan untuk menyamakan (*alignment*) pemahaman akan visi, misi, dan mempertemukan kepentingan yang berbeda dari setiap pihak serta menumbuhkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) atas rencana pembangunan *Smart City* yang diinisiasi. Dengan kata lain pembangunan *Smart City* merupakan usaha yang berkelanjutan, bertahap, dan bersifat multi sektoral oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen Masterplan *Smart City*.

Pada dasarnya konsep *Smart City* berfokus pada pengembangan elemen manusia melalui pemanfaatan teknologi. Jadi melalui teknologi setiap elemen didorong untuk berpikir kreatif dan aktif dalam melahirkan inovasi-inovasi demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Masterplan *Smart City* hadir sebagai wadah berbagai inovasi yang muncul dari proses berpikir kreatif dan identifikasi aktif. Masterplan *Smart City* memungkinkan setiap ide dapat terakomodasi ataupun memperkaya ide yang lainnya. Masterplan *Smart City* juga memastikan bahwa suatu ide tidak akan berdiri sendiri melainkan akan menjadi bagian dari suatu rencana implementasi yang terintegrasi dan komprehensif. Masterplan *Smart City* berperan vital sebagai landasan materi dan panduan pembangunan konsep kota masa kini dan masa depan. Masterplan ini berperan besar dalam membantu pemerintah menetapkan kebijakan, regulasi, dan arah serta prioritas pembangunan kota. Sebagai perencanaan yang disusun secara khusus berdasarkan visi, identitas dan karakter kota, masterplan *Smart City* mempermudah pemerintah dalam mengurai masalah khas perkotaan.

Masterplan *Smart City* juga memastikan proses transformasi menuju konsep kota cerdas baik itu pada tahap perencanaan, implementasi, maupun monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sehingga sebuah Masterplan *Smart City* haruslah memiliki kriteria sebagai

berikut :

1. Sesuai dengan karakter dan kebutuhan spesifik daerah;
2. Berpeluang untuk berhasil dilaksanakan secara maksimal;
3. Obyektif, tepat sasaran, dan tepat guna;
4. Berkesinambungan dalam menjaga keseimbangan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan;
5. Dapat secara nyata diimplementasikan sesuai dengan kemampuandaerah.

1.2. Tujuan Masterplan

Adapun tujuan dari disusunnya Pengembangan Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Pati;
2. Sebagai alat pengendali terhadap seluruh kegiatan untuk mendukung *Smart City* Kabupaten Pati;
3. Dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* Kabupaten Pati;
4. Menyelaraskan penerapan *Smart City* dengan *business process* pemerintah daerah, Perangkat Daerah lainnya, Instansi terkait serta dapat berakselerasi dalam percepatan transformasi birokrasi;
5. Menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Pati dalam dokumen perencanaan *Smart City* Pati;
6. Mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif;
7. Menyesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah pengampu kegiatan *Smart City*.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022;
 18. Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pati.

1.4. Kerangka Pikir *Smart City*

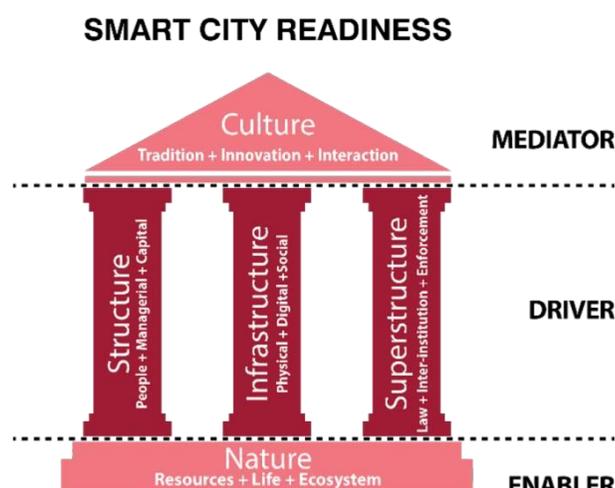
Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang dikembangkan oleh lembaga *think tank* dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Istilah *smart* dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

“pandai; cakap”, “cerdik; banyak akal”, dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran” dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “*intelligent*”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Dalam membangun *Smart City*, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*); struktur daerah (*structure*); infrastruktur (*infrastructure*); suprastruktur (*superstructure*); dan budaya (*culture*). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian *Smart City Readiness* difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

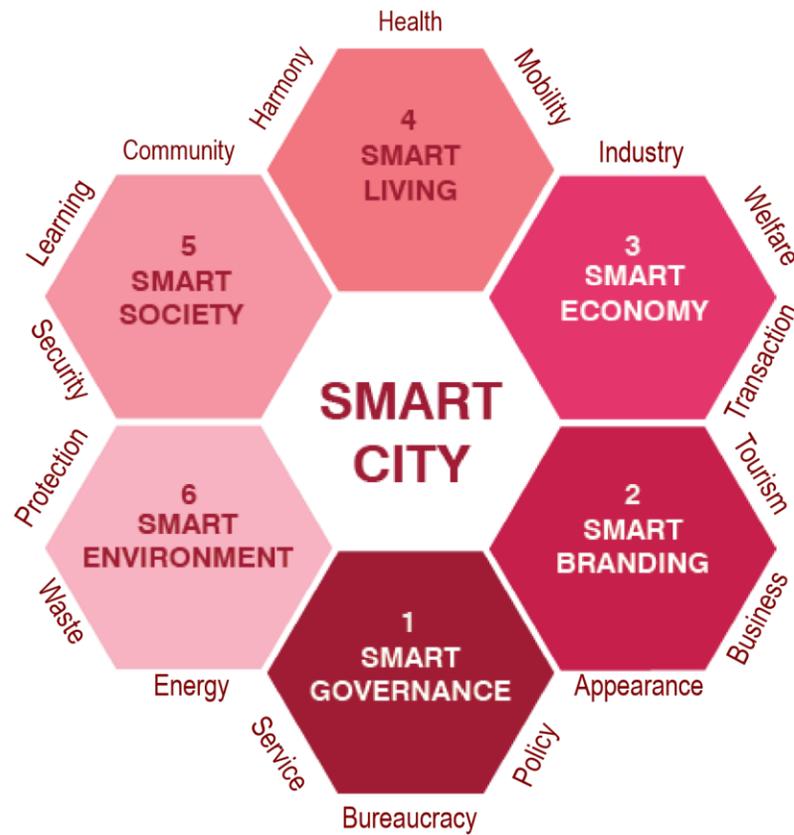
1. **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat *Smart City*, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
2. **Infrastruktur**; pembangunan infrastruktur pendukung *Smart City* yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
3. **Suprastruktur**; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan *Smart City*.



Gambar 1 Elemen Smart Readiness

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah *Smart City* adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam *Smart City* itu sendiri.



Gambar 2 Dimensi *Smart City*

Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN).

BAB II

VISI MISI *SMART CITY*

2.1. Visi *Smart City* Kabupaten Pati

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan Visi Kabupaten Pati pembangunan 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Visi Kabupaten Pati adalah **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”**. Misi dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akhlak budi pekerti sesuai budaya dan kearifan Lokal;
2. Menyelenggarakan Tatakelola Pemerintahan yang Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis dengan mengutamakan Pelayanan;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis pada Potensi Unggulan Pertanian dan Industri;
5. Meningkatkan Prasarana dan Sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan Perekonomian Daerah;
6. Meningkatkan Pemberdayaan Pengusaha dan Membuka Peluang Investasi;
7. Menciptakan Lapangan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan Misi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pati mempunyai Tujuan dalam Realisasi *Smart City* yaitu menjadikan Kabupaten Pati sebagai Kota dengan keunggulan di semua dimensi *Smart City*. Konsep *Smart City* mulai diterapkan untuk digunakan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pati, serta diharapkan mengutamakan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mendapat pelayanan maupun dalam memberikan tanggapan terhadap program pembangunan yang sedang berjalan, dan mampu meningkatkan manajemen perkotaan. *Smart City* digunakan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pati, serta diharapkan konsep *Smart City* mengutamakan pelayanan publik yaitu pelayanan pada masyarakat.

Selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 tersebut, dan sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati, maka Visi *Smart City* Kabupaten Pati adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN PATI YANG CERDAS, MAJU
DAN INOVATIF DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN PADA TAHUN 2025”**

Visi Smart City Tersebut, kemudian dijabarkan dalam **Misi** yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan daya saing daerah berbasis kearifan lokal; dan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan yang nyaman.

Misi ke-1 *Smart City* : **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi**, adalah dalam rangka untuk mendukung dan mempercepat tercapainya Misi Pemerintah Kabupaten Pati, yaitu **Menyelenggarakan Tatakelola Pemerintahan yang Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis dengan mengutamakan Pelayanan.**

Misi ke-2 *Smart City* : **Meningkatkan daya saing daerah berbasis kearifan lokal**, adalah dalam rangka untuk mendukung dan mempercepat tercapainya Misi Pemerintah Kabupaten Pati, yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis pada Potensi Unggulan Pertanian dan Industri;
2. Meningkatkan Prasarana dan Sarana yang memadai untuk mendukung pengembangan Perekonomian Daerah;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Pengusaha dan Membuka Peluang Investasi;
4. Menciptakan Lapangan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan.

Misi ke-3 *Smart City* : **Meningkatkan kualitas lingkungan yang nyaman**, adalah dalam rangka untuk mendukung dan mempercepat tercapainya Misi Pemerintah Kabupaten Pati, yaitu:

1. Meningkatkan akhlak budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan layanan publik menuju kualitas lingkungan yang nyaman untuk masyarakat.

2.2. Sasaran Smart City Kabupaten Pati

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran *Smart City* Kabupaten Pati adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai;
2. Peningkatan daya saing daerah bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki;
3. Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah;
4. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, dan nyaman bagi masyarakat;
5. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi;
6. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Pati yang baik, dan berkelanjutan.

Strategi untuk mencapai sasaran yang pertama : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai**, adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
2. Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi.

Strategi untuk mencapai sasaran kedua: **Peningkatan daya saing daerah bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki**, adalah:

1. Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*Business branding*);
2. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*Tourism Branding*);
3. Membangun dan memasarkan wajah kota (*branding*) Kabupaten Pati.

Strategi untuk mencapai sasaran ketiga: **Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah**, adalah:

1. Membangun ekosistem transaksi keuangan;
2. Membangun ekosistem industri dan UMKM yang berdaya saing; dan
3. Mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Strategi untuk mencapai sasaran keempat: **Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, dan nyaman bagi masyarakat**, adalah:

1. Menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang berkualitas;

2. Harmonisasi tata ruang wilayah; dan
3. Menyediakan fasilitas layanan publik yang nyaman.

Strategi untuk mencapai sasaran kelima: **Mewujudkan lingkungan masyarakat yang humanis dan dinamis, agar terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dan tanggap teknologi informasi**, adalah:

1. Mewujudkan ekosistem belajar yang efisien (*education*);
2. Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*communication*); dan
3. Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*).

Strategi untuk mencapai sasaran keenam: **Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup Kabupaten Pati yang baik, dan berkelanjutan**, adalah:

1. Melindungi ekosistem penting dan mengembalikan kawasan lahan kritis;
2. Mengelola limbah dan sampah; dan
3. Penghematan energi.

BAB III

STRATEGI PEMBANGUNAN SMART CITY

3.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang memadai

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari Pemerintah Daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi *Smart City* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan proses layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Dalam prakteknya, *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

Untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu sebagai *Smart Governance* memiliki tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapasitas SDM Penyedia layanan;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang layanan publik.
2. Meningkatnya efisiensi manajemen birokrasi dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyederhanakan prosedur birokrasi;
 - b. Pembuatan SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan;
 - d. Optimalisasi Sistem/ Aplikasi Data dan informasi.

3.1.1. Kegiatan Pembangunan Smart Governance

Tabel 1 Kegiatan Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Governance

No.	Kegiatan	nama inisiatif Smart City	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Daftar Siji Entuk Telu (TARJILU OKKE)	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang mudah cepat, tepat dan gratis.	Peningkatan cakupan jumlah akta kelahiran, akta kematian dan e-KTP dan KIA	70.000.000	APBD	Disdukcapil	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
2	Peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan	Layanan jemput bola e-KTP	Memudahkan layanan perekaman data kependudukan ke masyarakat.	Peningkatan cakupan jumlah perekaman e KTP		APBD	Disdukcapil		Jangka pendek
3	Penyedia pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Pengembangan layanan publik dengan tandatangan digital signature dan E-Retribusi IMB.	Untuk memudahkan pembayaran retribusi IMB dan mempercepat pelayanan Izin Masuk Kota.	Target PAD Retribusi IMB cepat tercapai dan pelayanan IMK cepat terlayani.	30.000.000	PAD	DPMPPTSP	PT Gamatech o Indonesia	Jangka pendek
4	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Temu bisnis investor Nasional UMKM dengan Pemerintah Kabupaten Pati pada Kegiatan Pati Bussines Forum.	Temu bisnis investor nasional, UMKM dengan pemerintah Kabupaten Pati	Jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Pati meningkat	100.000.000	PAD	DPMPPTSP		Jangka Pendek
5	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota.	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan Teknis LKPM On line	Realisasi investasi Kabupaten Pati	Tercapainya target realisasi investasi Kabupaten Pati	288.082.000	DAK	DPMPPTSP		Jangka Pendek

No.	Kegiatan	nama inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
6	Pembangunan Mal Pelayanan Publik	Pelayanan perizinan dan non perizinan	Memberikan pelayanan masyarakat di satu (1) tempat.	Pelayanan perizinan dan non perizinan terlayani dengan baik.	466.138.000 (terlaksana tahun 2020)	PAD	DPMPSTSP		Jangka pendek
7	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Pengadaan mebeleur Pengadaan komputer dan kelengkapannya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Pelayanan Kepegawaian Terpadu	a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya kepuasan ASN dalam pelayanan kepegawaian	99.372.000 48.040.000 21.000.000 20.680.000 2.847.000	APBD tahun 2020	BKPP	BKN	Jangka Pendek
8	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN	MySIMPATI (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pati)	Terwujudnya suatu sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi dalam suatu jaringan komputer yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati	ASN dapat mengakses data/informasi kepegawaiannya lebih mudah	100.000.000	APBD tahun 2020	BKPP	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
9	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	SIM UKPBJ	Mempercepat proses pengadaan, karena semua dilakukan secara elektronik. Serta memberikan data analisis untuk mengambil keputusan	Proses pengadaan transparan dan akurat serta cepat	30.000.000	APBD Tahun Anggaran 2022	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	-	Jangka Pendek

No.	Kegiatan	nama inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
10	Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	E-Consulting	Memberikan kemudahan pada OPD saat konsultasi tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah, pengadministrasian SPJ, Pengelolaan Aset dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan Undang – Undang yang berlaku		APBD	Inspektorat Daerah		Jangka Pendek
11	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	E-Wadul	Memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat , jumlah pengaduan dari masyarakat , jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.	Membantu Pelayanan Pengaduan Masyarakat		APBD	Inspektorat Daerah		Jangka Pendek
12	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Aplikasi Permohonan Pelayanan Kecamatan	Masyarakat dapat mengajukan permohonan pelayanan secara online , sehingga petugas dapat langsung proses dan diambil saat sudah jadi	Tidak ada antrian dari masyarakat saat mengurus permohonan atau jika ada syarat yang kurang tidak perlu bolak balik ke kecamatan	20.000.000	APBD	Kecamatan Pati	Kecamatan Gabus	Jangka pendek
13	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.	Aplikasi Satripasar dan Simpatik	Peningkatan layanan online pembayaran retribusi daerah	Wajib retribusi daerah dapat melakukan pembayaran retribusi secara online	40.000.000	PAD	BPKAD	BANK JATENG/ PT MPU JAKARTA	Jangka Pendek
14	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	WEB BPKAD	Peningkatan layanan WEB BPKAD	WEB BPKAD dapat menyajikan informasi terupdate	6.000.000	PAD	BPKAD	BANK JATENG	Jangka pendek

No.	Kegiatan	nama inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
15	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	e - Bphtb	Peningkatan layanan Online BPHTB	E-bphtb terupdate	40.000.000	PAD	BPKAD	BANK JATENG	Jangka Pendek
16	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	e -PBB	Peningkatan layanan online PBB	E-PBB terupdate	50.000.000	PAD	BPKAD	BANK JATENG	Jangka Pendek
17	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Ristribusi Daerah.	e-Trayek	Pembangunan Billing center redistribusi trayek di Kabupaten Pati	Layanan redistribusi ijin trayek dapat dilakukan secara online	20.000.000	PAD	BPKAD	BANK JATENG/ PT MPU JAKARTA	Jangka Pendek
18	Penyusunan Informasi Jabatan	Dokumen Informasi Jabatan	Mempermudah dalam memperoleh data base informasi jabatan	Tersedianya Data Base Informasi Jabatan	-	-	Bagian Organisasi	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
19	Penyusunan Laporan Evaluasi Kelembagaan	Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan	Mempermudah dalam penyusunan laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	Tersusunnya bahan laporan evaluasi kelembagaan dari masing-masing Perangkat Daerah	30.000.000	APBD	Bagian Organisasi	Pihak Ketiga	Jangka menengah
20	Penyusunan lapran Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan SAKIP	Mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya evaluasi Sakippada 49 Perangkat Daerah	30.000.000	APBD	Bagian Organisasi	:Pihak Ketiga	Jangka Menengah

No.	Kegiatan	nama inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
21	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	e-Layang (Layanan persuratan digital)	Pengelolaan layanan surat masuk dan surat keluar dan tersinkronisasi dengan data kepegawaian	Seluruh OPD menerakpan aplikasi eLayang dalam pengelolaan persuratan di OPD	200.000.000	APBN	Diskominfo	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
22	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi Dashboard	Integrasi data dalam 1 portal	Data di OPD dalam terintegrasi dalam 1 layanan	300.000.000	APBN	Diskominfo	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
23	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemda Kab/kota	SILATELI (Sistem Layanan Telekomunikasi)	Memberikan layanan penghubung antar OPD baik VOICE, DATA, dan ViDEO	Memberikan layanan penghubung antar OPD baik VOICE, DATA, dan ViDEO	450.000.000	APBD	Diskominfo	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
24	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	LARAGRAM (Layanan Radio Gram)	Layanan Penghubung Komunikasi antara Diskominfo, kecamatan dan antar OPD	Surat terkirim dengan cepat, tepat, selamat(terjaga kerahasiaan) hemat efisien anggaran dan waktu	500.000.000	APBD	Diskominfo	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
25	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	LATELIT (Layanan Telekomunikasi Satelit)	Memberikan Layanan telepon satelit kepada Pejabat VIP dan Kepala OPD tertentu pada saat Jaringan Umum Telekomunikasi trouble (bencana alam)	Suksesnya Telekomunikasi Jika terjadi trouble pada jaringan umum telekomunikasi	600.000.000	APBD	Diskominfo	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
26	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemda Kabupaten Pati	LATERAPU (Layanan Terpadu Radio Pancar Ulang)	Melayani Telekomunikasi melalui fasilitas RPU	Terlayannya Radio Pancar Ulang Telekomunikasi OPD yang membutuhkan	600.000.000	APBD	Diskominfo	Pihak Ketiga	Jangka Pendek

No.	Kegiatan	nama inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
27	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik.	Layanan Counter Survelance (Kontra Pengindraan/ assesmen security)	Menjamin Keamanan Ruangan tertentu dari pengindraan dari pihak pihak yang tidak berhak	Terjaminnya Keamanan Informasi pada ruangan tertentu (Ruang VIP dan ruang ruang penting lainnya	500.000.000 s/d 1.500.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Menengah
28	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota	CSIRT(Computer SecurityInsident Responde Team)	Pelayananpada OPD yang mengalami kerusakan software akibat virus	Sistem Komputer Aman	150.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Menengah
29	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik.	SOC(Security Operation Center)	Pemantauan Trafik Siber	Sistem Siber aman	1000.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
30	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya KAMI	LIGA TEKI (Libur Siaga Telekomunikasi dan Keamanan Informasi)	Siaga keamanan informasi,terima/kirim berita /surat cepat dan keamanan informasi pada hari dan hari diliburkan	Terlaksananya KAMI dan terkirimnya dan diterimanya dan diterimanya berita /surat cepat dan keamanan informasi pada hari libur dan hari diliburkan	100.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Pendek
31	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda	LAEKAMI (Layanan edukasi keamanan Informasi)	Memberikan edukasi keamanan informasi kepada masyarakat	masyarakat sadarkan informasi	100.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Menengah
32	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	LaDRC (Layanan DisasterRecovery System)	Layanan Backup ServerUtama Seluruh OPD	Terjaminnya Kelangsungan/Continuitas dan Keamanan pada saat terjadi bencana (bencana alam, ancaman, keadaan darurat)	600.000.000	APBD	DISKOMINFO		Jangka Menengah

No.	Kegiatan	nama inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
33	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Assesment / Maturiry Kami	Untuk mendapatkan tingkat keamanan Siber	Terlaksananya KAMI dan terkirimnya dan diterimanya dan diterimanya berita /surat cepat dan keamanan informasi pada hari libur dan hari diliburkan	100.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Pendek
34	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik.	TTE	Terjaminnya keamanan dan kecepatan validasi surat digital	Terlaksananya TTE bagi Kepala OPD	100.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Pendek
35	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya KAMI	Fire Wall	Terjaminnya keamanan data pada server induk	Terlaksananya penjaminan Keamanan DATA	700.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak ketiga	Jangka Menengah
36	Pengolahan Updating dan analisis data dan Statistik daerah	Portal Satu Data Indonesia	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Terciptanya data berkualitas , mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat serta Daerah		APBD	DISKOMINFO		Jangka Pendek
37	Informasi dan Publikasi Masyarakat	Sedep Informasi (Serambi Depan Informasi)	Program Pembuatan Strategi Komunikasi melalui media pemerintah dan non pemerintah	Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat yang melek informasi dan literasi digital		APBD	DISKOMINFO		Jangka Pendek

No.	Kegiatan	nama inisiatif Smart City	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
38	Informasi dan Publikasi Masyarakat	Ruang Press Room	Program Pembuatan Strategi Komunikasi melalui media pemerintah dan non pemerintah	Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat yang melek informasi dan literasi digital		APBD	DISKOMINFO		Jangka Pendek
39	Informasi dan Publikasi Masyarakat	Ruang Literasi Masyarakat	Program Pembuatan Strategi Komunikasi melalui media pemerintah dan non pemerintah	Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat yang melek informasi dan literasi digital		APBD	DISKOMINFO		Jangka Pendek
40	Informasi dan Publikasi Masyarakat	Sistem Website PPID Kabupaten Pati	Program Pemberian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu dan sesuai dengan UU yang berlaku.		APBD	DISKOMINFO		Jangka Menengah

3.1.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Governance

Tabel 2 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Governance dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2021-2022

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Keluaran	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi yang mudah cepat, tepat dan gratis.	Peningkatan cakupan jumlah akta kelahiran, akta kematian, e-KTP dan KIA	Daftar Sisi Entuk Telu (TARJILU OKKE)	70.000.000	APBD	Disdukcapil	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
2	Peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan	Penataan Administrasi Kependudukan	Memudahkan layanan perekaman data kependudukan ke masyarakat.	Peningkatan cakupan jumlah perekaman e KTP	Layanan jemput Bola E-KTP		APBD	Disdukcapil		Jangka pendek
3	Penyedia pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	Program pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	Untuk memudahkan pembayaran retribusi IMB dan mempercepat pelayanan Izin Masuk Kota.	Target PAD Retribusi IMB cepat tercapai dan pelayanan IMK cepat terlayani.	Pengembangan Aplikasi SIMYANDU dengan Sistem tandatangan digital dan pembayaran IMB langsung ke Bank Jateng tanpa melalui Bendahara Penerima	30.000.000	PAD	DPMPSTSP	PT Gamatechno Indonesia	Jangka pendek

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Keluaran	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
4	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi Kabupaten Pati	Tercapainya target realisasi investasi Kabupaten Pati	Kunjungan ke proyek Penanam Modal, Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan Teknis LKPM online	288.082.000	DAK	DPMPPTSP		Jangka Pendek
5	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Temu bisnis investor nasional, UMKM dengan Pemerintah Kabupaten Pati	Jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Pati meningkat	Temu bisnis / investor tour UMKM (PBF-Pati Bussines Forum)	100.000.000	PAD	DPMPPTSP		Jangka Pendek
6	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pelayanan Publik yang mudah cepat dan transparan	Memberikan pelayanan masyarakat di satu tempat.	Pelayanan perizinan dan non perizinan terlayani dengan baik	466.138.000	PAD	DPMPPTSP		Jangka Pendek
7	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Pengadaan mebeleur Pengadaan komputer dan kelengkapannya Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme	Meningkatnya kepuasan ASN dalam pelayanan kepegawaian	Pelayanan Kepegawaian Terpadu	199.372.000 48.040.000 21.000.000 20.680.000 2.847.000	APBD tahun 2020	BKPP	BKN	Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Keluaran	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
8	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	ASN dapat mengakses data/informasi kepegawaiannya lebih mudah	MySIMPATI (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pati)	100.000.000	APBD tahun 2022	BKPP	Pihak Ketiga	Jangka Sedang
9	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Mempercepat proses pengadaan, karena semua dilakukan secara elektronik. Serta memberikan data analisis untuk mengambil keputusan	Proses pengadaan transparan dan akurat serta cepat	SIM UKPBJ	30.000.000	APBD TA 2022	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pati	-	Jangka Pendek
10	Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Memberikan kemudahan pada OPD saat konsultasi tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah, pengadministrasian SPJ, Pengelolaan Aset dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan Undang – Undang yang berlaku	E-Consulting		APBD	Inspektorat Daerah		Jangka Pendek
11	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat, jumlah pengaduan dari masyarakat, jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Membantu Pelayanan Pengaduan Masyarakat	E-Wadul		APBD	Inspektorat Daerah		Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Keluaran	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Timeline
12	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Masyarakat dapat mengajukan permohonan pelayanan secara online, sehingga petugas dapat langsung proses dan diambil saat sudah jadi	Tidak ada antrian darimasyarakat saat mengurus permohonan atau jikaada syarat yang kurang tidak perlu bolak balik ke kecamatan	Aplikasi Permohonan Pelayanan Kecamatan	20.000.000	APBD	Kecamatan Pati	Kecamatan Gabus (sudah memiliki aplikasi)	Jangka pendek
13	Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Layanan On line Pembayaran Restribusi Daerah	Wajib Restribusi daerah dapat melakukan pembayaran restribusi secara online.	Aplikasi Satripasar dan Simpatik terupdate	40.000.000	PAD	BPKAD	PT. MPU Jakarta dan Bank Jateng	Jangka pendek 2021
14	Penagihan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan layanan WEB BPKAD	WEB BPKAD dapat menyajikan informasi terupdate	WEB BPKAD terupdate	6.000.000	PAD	BPKAD		Jangka Pendek 2021
15	Penagihan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan layanan Online BPHTB	E-bphtb terupdate	E-bphtb terupdate	40.000.000	PAD	BPKAD	Bank Jateng	Jangka Pendek 2021
16	Penagihan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan layanan online PBB	E-PBB terupdate	E-PBB terupdate	50.000.000	PAD	BPKAD	Bank Jateng	Jangka Pendek 2021
17	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pembangunan Biling Center Restribusi Trayek di Kabupaten Pati	Layanan restribusi ijin trayek dapat dilakukan secara online	E-trayek terupdate	20.000.000	PAD	BPKAD	PT MPU Jakarta Bank Jateng	Jangka Pendek 2021

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Keluaran	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
18	Penyusunan Informasi Jabatan	Penataan Organisasi	Memper mudah dalam memperoleh data base informasi jabatan	Tersedianya Data Base Informasi Jabatan	Dokumen Informasi Jabatan	-	-	Bagian Organisasi	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
19	Penyusunan Laporan Evaluasi Kelembagaan	Penataan Organisasi	Memper mudah dalam penyusunan laporan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	Tersusunnya bahan laporan evaluasi kelembagaan dari masing-masing Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan	30 .000.000	APBD	Bagian Organisasi	Pihak ketiga	Jangka menengah
20	Penyusunan laporan sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penataan Organisasi	Memper mudah dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Kinerja Perangkat daerah	Terlaksanannya evaluasi Sakip pada 49 Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Sakip	30 .000.000	APBD	Bagian Organisasi	Pihak ketiga	Jangka Panjang
21	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan layanan surat masuk dan surat keluar dan tersinkronisasi dengan data kepegawaian	Seluruh OPD menerakpan aplikasi eLayang dalam pengelolaan persuratan di OPD	e-Layang (Layanan persuratan digital)	200.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
22	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Program Aplikasi Informatika	Integrasi data dalam 1 portal	Data di OPD dalam terintegrasi dalam 1 layanan	Aplikasi Dashboard	300.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak Ketiga	Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Keluaran	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
23	Penyediaan layanan Keamanan Informasi Pemda Kab/kota	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Memberikan layanan penghubung antar OPD baik VOICE, DATA, dan ViDEO	Memberikan layanan penghubung antar OPD baik VOICE, DATA, dan ViDEO	SILATELI (Sistem Layanan Telekomunikasi)	450.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
24	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Layanan Penghubung Komunikasi antara Diskominfo, kecamatan dan antar OPD	Surat terkirim dengan cepat, tepat, selamat (terjaga kerahasiannya) hemat efisien anggaran dan waktu	LARAGRAM (Layanan Radiogram)	500.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
25	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Memberikan Layanan telepon satelit kepada Pejabat VIP dan Kepala OPD tertentu pada saat Jaringan Umum Telekomunikasi trouble (bencana alam)	Suksesnya Telekomunikasi Jika terjadi trouble pada jaringan umum telekomunikasi	LATELIT (Layanan Telekomunikasi Si Satelit)	600.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
26	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemda Kabupaten Pati	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Melayani Telekomunikasi melalui fasilitas RPU	Terlayannya Radio Pancar Ulang Telekomunikasi OPD yang membutuhkan.	LATERAPU (Layanan Terpadu Radio Pancar Ulang)	600.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
27	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik.	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Menjamin Keamanan Ruang tertentu dari pengindraan dari pihak pihak yang tidak berhak	Terjaminnya Keamanan Informasi pada ruang tertentu (Ruang VIP dan ruang ruang penting lainnya	Layanan Counter Survelance (Kontra Pengindraan /Assesmen security)	500.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Menengah
28	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Pelayanan pada OPD yang mengalami kerusakan software akibat virus	Sistem Komputer aman	CSIRT (Computer Security InsidentResponse Team)	150.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Keluaran	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
29	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Pemantauan trafik Siber	Sistem Siber Aman	SOC (Security Operation Center)	1.000.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
30	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya KAMI	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Siaga keamanan informasi, terima/ kirim berita /surat cepat dan keamanan informasi pada hari dan hari diliburkan	Terlaksananya KAMI dan terkirimnya dan diterimanya dan diterimanya berita /surat cepat dan keamanan informasi pada hari libur dan hari diliburkan	LIGA TEKI (Libur Siaga Telekomunikasi dan Keamanan Informasi)	100.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Pendek
31	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda	Program pengembangan data /informasi/statistik daerah	Layanan Backup Server Utama Seluru OPD	Terjaminnya Kelangsungan/ Continuitas dan Keamanan pada saat terjadi bencana (bencana alam,	LAEKAMI (Layanan Edukasi Keamanan Informasi)	100.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Menengah
32	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Layanan Backup Server Utama Seluru OPD	Terjaminnya Kelangsungan/ Continuitas dan Keamanan pada saat terjadi bencana (bencana alam, ancaman, keadaan darurat)	LaDRC (Layanan Disaster Recovery System)	600.000.000	APBD	DISKOMINFO		Jangka Menengah
33	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Untuk mendapatkan tingkat keamanan Siber	Terlaksananya KAMI dan terkirimnya dan diterimanya dan diterimanya berita /surat cepat dan keamanan informasi pada hari libur dan hari diliburkan	Assesment/ Maturity KAMI	70.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Pendek
34	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota Berbasis elektronik dan non elektronik.	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Terjaminnya keamanan dan kecepatan validasi surat digital	Terlaksananya TTE bagi Kepala OPD	TTE	100.000.000	APBD	DISKOMINFO	BSSN	Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Keluaran	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
35	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya KAMI	Program pengembangan komunikasi, Informasi, dan media massa	Terjaminnya keamanan data pada server induk	Terlaksananya penjaminan Keamanan Data	Fire Wall	700.000.000	APBD	DISKOMINFO	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
36	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Memberikan edukasi keamanan informasi kepada masyarakat	masyarakat sadar akan informasi	Portal Satu Data Indonesia		APBD	DISKOMINFO		Jangka Pendek
37	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Program Pembuatan Strategi komunikasi melalui media pemerintah dan non pemerintah	Layanan Backup Server Utama Seluru OPD	Terjaminnya Kelangsungan/Continuitas dan Keamanan pada saat terjadi bencana (bencana alam, ancaman, keadaan darurat)	Sedep Informasi (Serambi Depan Informasi)		APBD	DISKOMINFO		Jangka Pendek
38	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Program Pembuatan Strategi Komunikasi melalui media pemerintah dan non pemerintah	Untuk mendapatkan tingkat keamanan Siber	Terlaksananya KAMI dan terkirimnya dan diterimanya berita /surat cepat dan keamanan informasi pada hari libur dan hari diliburkan	Ruang Press Room		APBD	DISKOMINFO		Jangka Pendek
39	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemda Kab/Kota berbasis elektronik dan non elektronik.	Program Pembuatan Strategi Komunikasi melalui media pemerintah dan non pemerintah	Terjaminnya keamanan dan kecepatan validasi surat digital	Terlaksananya TTE bagi Kepala OPD	Ruang Literasi Masyarakat		APBD	DISKOMINFO		Jangka Pendek
40	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya KAMI	Program Pemberian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Program Pemberian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu dan sesuai dengan UU yang berlaku.	Sistem Website PPID Kabupaten Pati		APBD	DISKOMINFO		Jangka Pendek

3.2. Peningkatan daya saing daerah bertumpu pada potensi unggulan yang dimiliki

Dimensi kedua dalam *Smart City* adalah *Smart Branding*, yaitu *branding* daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota.

Smart Branding menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokalnya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya.

Peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional dalam rangka mewujudkan *Smart Branding* memiliki tujuan :

1. Meningkatnya daya saing komoditas unggulan berbasis potensi wilayah secara berkelanjutan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sinergisitas antarpengelolaan dan pengembangan dengan pemasaran;
 - b. Regulasi dan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan produk unggulan;
 - c. Fasilitasi pemasaran produk-produk unggulan berbasis potensi wilayah;
 - d. Publikasi dan promosi secara *multi channel* terhadap komoditas unggulan mengacu pada potensi masing-masing;
 - e. Meningkatkan indikator akses (terhadap kegiatan publikasi dan promosi).
2. Membangun infrastruktur dan memasarkan pariwisata, melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan infrastruktur pariwisata yang memadai;
 - b. Penyediaan jaringan transportasi penunjang pariwisata;
 - c. Pemasaran pariwisata melalui pariwisata *go digital*;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang interaksi;
 - e. Penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Meningkatnya integrasi pemasaran *offline* dan *online* untuk produk-produk unggulan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melalui kegiatan:
 - a. Pemasaran produk unggulan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara *online* dan *offline*;

- b. Penguatan kapasitas kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam hal *marketing* dan manajemen bisnis.

3.2.1. Kegiatan Pembangunan *Smart Branding*

Tabel 3 Kegiatan Pembangunan *Smart City* pada Elemen *Smart Branding*

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
1	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian.	Promosi produksi jeruk pamelu bageng dan kelapa kopyor	Memberikan informasi ke masyarakat tentang produksi jeruk pamelu dan kelapa kopyor di Kabupaten Pati secara online (integrasi dengan web Pemerintah Kabupaten Pati)	Tersampainya informasi hasil pertanian, peternakan dan perkebunan	430.000.000	APBD	Dinas Pertanian		Jangka Menengah
2	Pengendalian Penyediaan Benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kawasan peternakan unggas	Memberikan penyuluhan dan pendampingan serta mempromosikan program sentra unggas kepada peternak unggas	Tersampainya informasi tentang potensi kawasan peternakan.	415.575.000	APBD	Dinas Pertanian		Jangka Menengah
3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi <i>Smart City</i>	Integrasi layanan publik dalam 1 portal	Data layanan publik terintegrasi pada 1 layanan	200,000,000	APBN	Diskominfo		Jangka Menengah
4	Pengelolaan Akun Media Sosial	Desk Analisa Sosial Media	Memonitor , menganalisa dan merespon topik yang terkait dengan Pemerintah dan Kepala Daerah	Jumlah Interaksi dan follower sosial media pemerintah meningkat, serta sentimen publik yang positif terhadap Pemerintah Daerah.	60.000.000	APBD	Bag. Prokompim Setda		Jangka pendek

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
5	Pengembangan kebudayaan & pariwisata	Festival Budaya Daerah	Untuk pelestarian pengenalan budaya	Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi	150.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kelompok Budaya dan Seni masyarakat dan sekolah	Jangka Pendek/Menengah
6	Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	Proses boyongan dalam rangka peringatan hari jadi Pati	Untuk pelestarian dan pengenalan budaya hari jadi Pati	Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi; Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	1,5 M	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kelompok Budaya dan Seni masyarakat dan sekolah	Jangka Menengah
7	Pembuatan Aplikasi E Sarpras SMP	E sarpras SMP	Untuk mengetahui tingkat kerusakan sarpras SMP	Memudahkan dalam pengambilan keputusan.		APBD dan swadaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seluruh SMP se Kabupaten Pati	Jangka pendek

3.2.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Branding*

Tabel 4 Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Branding* dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2021 – 2022

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksanaan	Kerja Sama	Time Line
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Potensi Produksi jeruk Pamelor dan Kepala kopyor	Memberikan Informasi ke masyarakat Tentang produksi Jeruk pamelor dan Kelapa kopyor di Kabupaten Pati secara Online (integrasi Dengan web Pemerintah Kabupaten Pati)	Tersampainya informasi hasil pertanian, peternakan dan perkebunan	430.000.000	APBD	Dinas Pertanian		Jangka menengah
2	Pengendalian Penyediaan Benih / bibit ternak dan	Program penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kawasan Peternakan Unggas	Memberikan Penyuluhan dan pendampingan Serta mempromosikan Program sentra Unggas kepada Peternak unggas.	Tersampainya Informasi tentang Potensi kawasan Peternakan di Kabupaten Pati	415.575.000	APBD	Dinas Pertanian		Jangka Menengah
3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi <i>Smart City</i>	Integrasi layanan publik dalam 1 portal	Data layanan publik terintegrasi pada 1 layanan	200,000,000	APBN	Diskominfo		2022 - 2025	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
4	Pengelolaan Akun Media Sosial	Peningkatan pelayanan informasi publik	Desk Analisa Sosial Media	Memonitor, menganalisa dan merespon topik yang terkait dengan Pemerintah dan Kepala Daerah	Jumlah Interaksi dan follower sosial media milik Pemerintah meningkat serta sentimen publik yang positif terhadap Pemerintah Daerah.	60.000.000	APBD	Bag. Prokompim Setda		Jangka pendek

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksanaan	Kerja Sama	Time Line
5	Pengembangan kebudayaan & pariwisata	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Festival Budaya Daerah	Untuk pelestarian dan pengenalan budaya	Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi	150.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kelompok Budaya dan Seni masyarakat dan sekolah	Jangka Pendek/Menengah
6	Fasilitasi Penyelenggaraan festival budaya daerah	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Proses boyongan dalam rangka peringatan hari jadi Pati	Untuk pelestarian dan pengenalan budaya hari jadi Pati	Jumlah peserta yang ikut berpartisipasi; Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	1,5 M	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kelompok Budaya dan Seni masyarakat dan sekolah	Jangka Menengah
7	Pembuatan Aplikasi E Sarpras SMP		Aplikasi bisa di akses secara baik	Untuk mengetahui tingkat kerusakan sarpras SMP	Memudahkan dalam pengambilan keputusan		APBD dan swadaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Seluruh SMP se Kabupaten Pati	Jangka pendek

3.3. *Smart Economy*

Dimensi ketiga dalam *Smart City* adalah *Smart Economy* atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart Economy* dalam *Smart City* dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

Sasaran dari dimensi *Smart Economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *Smart Economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

Adapun tujuan dari *Smart Economy* ini yaitu: Meningkatkan pembinaan petani dan pelaku usaha

1. Penguatan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing, melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi pemanfaatan *market place* untuk produsen dan konsumen dalam memasarkan produk;
 - b. Memfasilitasi Produsen untuk melakukan ekspansi pasar, dalam rangka perluasan pasar untuk produk-produk daerah.
2. Menyediakan ekosistem rantai pasokan (*supply chain*) komoditas unggulan, melalui strategi:
 - a. Menyediakan saluran distribusi;
 - b. Meningkatkan Rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan *cluster industry*;
 - c. meminimalisasi biaya operasi.
3. Pemberdayaan petani dan masyarakat pelaku usaha mulai dari produksi hingga pemasaran komoditas-komoditas unggulan melalui Strategi meningkatkan pembinaan petani dan pelaku usaha.

3.3.1. Kegiatan Pembangunan *Smart Economy*

Tabel 5 Kegiatan Pembangunan *Smart City* pada Elemen *Smart Economy*

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
1	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	SIPIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati)	Membentuk keterbukaan pasar ikan; meningkatkan kesejahteraan nelayan dan retribusi daerah (sistem non tunai bekerjasama dengan Bank)	Peningkatan pendapatan daerah dan nelayan	100.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan		Jangka pendek
2	Informasi Budidaya Ikan	Informasi Budidaya Ikan	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang budidaya ikan	Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan budidaya ikan		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan		Jangka Pendek
3	Penyusunan data base UMKM	SIMAGNUM (Sistem Informasi Manajemen UMKM)	Membantu pemasaran UMKM; Sarana promosi dan terkumpul database UMKM	Peningkatan jumlah KUB / Klaster Usaha Mikro Proporsi KUB / Klaster Usaha mikro yang menjalin kemitraan.	36.500.000	APBD	Dinas Koperasi UMKM	OPD terkait	Jangka Pendek
4	Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian (sosialisasi SIKOPI)	SIKOPI (Sistem Informasi Koperasi)	Memudahkan pelaporan berkala; memudahkan pemantauan kinerja koperasi; Mengetahui keberadaan koperasi	Prosentase Peningkatan manajemen koperasi . Prosentase koperasi yang berkinerja baik.	19.296.000	APBD	Dinas Koperasi dan UMKM	OPD terkait	Jangka Pendek
5	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Informasi Ketahanan Pangan	Memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui informasi ketahanan pangan	Masyarakat mengetahui akses pangan	20.000.000	APBD	Dinas Ketapang	-	Jangka Pendek
6	Promosi Produk Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah dan Pangan Lokal	Informasi Pangan Lokal	Memberikan informasi ke masyarakat tentang pangan lokal Kabupaten Pati	Masyarakat mengetahui tentang pangan lokal	25.000.000	APBD	Dinas Ketapang	-	Jangka Pendek

No	Kegiatan	Nama Inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
7	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Sub Kegiatan : Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.	GOLEH	Produk lokal/ <u>U</u> nggulan Kabupaten Pati dapat dikenal lebih luas dan mempertemukan konsumen dan produsen	Peningkatan transaksi serta peningkatan pendapatan UMKM	50.000.000	APBD	Disdagperin	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
8	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : Penyediaan sarana distribusi perdagangan.	Pasar Puri Online (PAPIBEJO)	Meningkatkan transaksi perdagangan di Pasar Puri melalui jaringan aplikasi online.Sekaligus mengurangi klaster penularan covid 19 di Pasar.	Peningkatan transaksi perdagangan di Pasar Puri melalui jaringan aplikasi online.	10.000.000	APBD	Disdagperin	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
9	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten /kota Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota.	Cek Produk Pati	Produk unggulan Kabupaten Pati di kenal luas dan identitas produk sebagai produk Pati akan dengan mudah diketahui sehingga dapat mempromosikan produk ke masyarakat luas.	Memudahkan penelusuran informasi terkait produk daerah ,profit dan kontak serta media sosial IKM yang memproduksi.	50.000.000	APBD	Disdagperin	Pihak Ketiga	Jangka Pendek

3.3.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Economy*

Tabel 6 Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Economy* dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2021-2022

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
1	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	SIPIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati)	Membentuk keterbukaan pasar ikan; meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan Restribusi daerah (sistem Non tunai bekerjasama dengan Bank)	Peningkatan Pendapatan daerah Dan nelayan	100.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan		Jangka Pendek
2	Informasi Budidaya Ikan	Program Pengembangan Budidaya Ikan	Informasi Budidaya Ikan	Memberikan informasi kepada masyarakat tentang budidaya ikan	Meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan budidaya ikan		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan		Jangka Pendek
3	Penyusunan data base UMKM	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Membantu pemasaran UMKM Sarana promosi dan terkumpulnya data base UMKM	Peningkatan jumlah KUB/Klaster Usaha Mikro Proporsi KUB/Klaster Usaha Mikro yang menjalin kemitraan	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi informasi dan perkembangan regulasi perkoperasian	36.500.000	APBD	Dinkop UMKM Pati	OPD Terkait	Jangka Pendek
4	Sosialisasi prinsip – prinsip pemahaman perkoperasian (sosialisasi SIKOPI)	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Memudahkan pelaporan berkala, memudahkan pemantauan kinerja koperasi dan mengetahui keberadaan koperasi	Prosentase peningkatan manajemen koperasi dan prosentase kinerja koperasi yang berkinerja baik	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi informasi dan perkembangan regulasi perkoperasian	19.296.000	APBD	Dinkop UMKM Pati	OPD terkait	Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
5	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Memudahkan akses masyarakat untuk mengetahui informasi ketahanan pangan	Masyarakat mengetahui akses pangan	Masyarakat mengetahui akses pangan	20.000.000	APBD	Dinas Ketapang		Jangka Pendek
6	Promosi Produk Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah dan Pangan Lokal	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Memberikan informasi ke masyarakat tentang pangan lokal Kabupaten Pati	Masyarakat mengetahui tentang pangan lokal	Masyarakat mengetahui tentang pangan lokal	25.000.000	APBD	Dinas Ketapang		Jangka Pendek
7	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Sub Kegiatan : Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	Aplikasi GOLEH	Produk lokal/Unggulan Kabupaten Pati dapat dikenal lebih luas dan mempertemukan konsumen dan produsen	Peningkatan transaksi serta peningkatan pendapatan UMKM	50.000.000	APBD	Disdagperin	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
8	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : Penyediaan sarana distribusi perdagangan.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	Pasar Puri Online (PAPIBEJO)	Meningkatkan transaksi perdagangan di Pasar Puri melalui jaringan aplikasi online. Sekaligus mengurangi kluster penularan covid 19 di Pasar.	Peningkatan transaksi perdagangan di Pasar Puri melalui jaringan aplikasi online.	10.000.000	APBD	Disdagperin	Pihak Ketiga	Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
9	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten /kota Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan usaha produk ekspor unggulan kab/kota.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	Aplikasi CEK Produk Pati	Produk unggulan Kabupaten Pati di kenal luas dan identitas produk sebagai produk Pati akan dengan mudah diketahui sehingga dapat mempromosikan produk ke masyarakat luas.	Memudahkan penelusuran informasi terkait produk daerah, profit dan kontak serta media sosial IKM yang memproduksi.	50.000.000	APBD	Disdagperin	Pihak Ketiga	Jangka Pendek

3.4. *Smart Living*

Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*.

Sasaran dari *Smart Living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Adapun tujuan dari *Smart Living* ini yaitu:

1. Harmonisasi tata ruang wilayah berupa Pembangunan infrastruktur fisik bagi masyarakat berbasis pendekatan spasial kewilayahan, melalui strategi :
 - a. Pembangunan perumahan di pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan;
 - c. Pembangunan fasilitas perkotaan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
2. Penyediaan informasi spasial untuk masyarakat, melalui strategi menyiapkan informasi spasial yang dapat diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi yang ada.
3. Meningkatkan kualitas layanan transportasi melalui strategi :
 - a. Menyiapkan jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata, dan lokasi strategis lainnya;
 - b. Penyediaan moda transportasi umum bagi masyarakat dipedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian.
4. Peningkatan penyediaan akses terhadap layanan bagi masyarakat melalui strategi:
 - a. Penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat;
 - b. Penyediaan fasilitas bagi masyarakat;
 - c. Penyediaan fasilitas sosial dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat.

3.4.1. Kegiatan Pembangunan *Smart Living*

Tabel 7 Kegiatan Pembangunan *Smart City* pada Elemen *Smart Living*

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif Smart City	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
1	Penyusunan /pengembangan Sistem Informasi Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Sistem informasi Database Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Untuk mengetahui data base Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Pedesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Proses Pengajuan Proposal dan laporan akhir pelaksanaan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati dapat diperoleh secara up to date dan lebih cepat.	30.000.000	APBD	DPUTR	Pihak Ketiga	Jangka pendek /Jangka Menengah
2	Penyusunan informasi/data base jalan; Penyusunan informasi/data base jembatan	Sistem Informasi Database Jaringan Jalan dan Jembatan	Menyediakan database jalan dan jembatan yang akurat,	Proses perencanaan dan penanganan jalan dan jembatan lebih cepat dan tepat	50.000.000	APBD	DPUTR	Pihak Ketiga	Jangka pendek / Jangka Menengah
3	Penyusunan informasi /database Tata Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Pati	Menyediaan data /informasi perencanaan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pati	Mempercepat proses penyebaran informasi rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Pati yang mudah diakses oleh masyarakat , pelaku usaha dan investor.	50.000.000	APBD	DPUTR	Pihak Ketiga	Jangka pendek/ Jangka Menengah
4	Pengembangan sistem informasi Rumah Sakit	Pendaftaran Online Rawat Jalan	Memberikan kemudahan pendaftaran online	Pelayanan semakin cepat, masyarakat pengguna semakin puas	15.000.000	BLUD	UPT RSUD RAA Soewondo Pati	Pihak Ketiga	Jangka pendek/ Jangka Menengah 2022-2023
5	E-RM Rawat Jalan dan Rawat Inap	E-Rekam Medis Pasien	Kelengkapan catatan medis pasien , kemudahan akses data pasien dan dapat meningkatkan keamanan pasien yang baik sehingga sangat mendukung penegakan keputusan klinis serta dapat meningkatkan keamanan.	Kepuasan pelanggan dan kepuasan Pengguna Rekam Medis (PPA)	30.000.000	BLUD	UPT RSUD RAA Soewondo Pati	Pihak Ketiga	Jangka pendek/ Jangka Menengah 2022-2023

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif Smart City	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
6	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	SIAPak	Mempercepat proses pengaduan masyarakat dan penanganan oleh petugas	Banyaknya pengguna SIAPak, Waktu penanganan aduan singkat	30.000.000	APBD	Satpol PP	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
7	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	SifaNa (Smart Informasi Bencana)	Untuk penanganan dini potensi bencana banjir, dari mulai peringatan, kesiapsiagaan hingga penanganan darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Pati	Untuk mengurangi dampak negatif akibat bencana banjir yang timbul secara cepat, tepat, efektif dan efisien	75.000.000	APBD	BPBD	Pihak ke – 3 (tiga) dan komunitas relawan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jangka Menengah (2023)
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pasien Lansia	Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien pada lansia dengan mengurangi resiko	Terwujudnya kemampuan pelayanan Geriatri tingkat lengkap sesuai PMK 79 tahun 2014	50.000.000	APBD	UPT. RSUD Kayen	Pihak Ketiga	2022-2023
9	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	SI GARDA	Terselenggaranya pelayanan terpadu bagi penderita Kegawatdaruratan sehari - hari maupun keadaan bencana.	Cakupan Pelayanan Kegawatdaruratan dan Bencana terlayani (jumlah kasus , kecepatan penanganan, prosentase jumlah korban yang di tangani)	131.903.500	APBD	Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Diskomin foda Pihak Ketiga	Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif Smart City	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	SIG (Sistem Informasi Geografis) STUNTING	Tervalidasinya data stunting gizi dari sumber data eppgm, dengan menggunakan metode validasi AGPS berbasis android, melalui : a. Terbentuknya aplikasi e-stunting berbasis android untuk memetakan latitude dan longitude status gizi anak balita di suatu wilayah, b. Terbentuknya aplikasi peta stunting berbasis website dengan pewarnaan berdasarkan kriteria stunting yang telah ditetapkan. c. Terbentuknya kelompok tenaga validator pemetaan stunting anak balita dalam suatu wilayah menggunakan aplikasi android e-stunting.	Terpublikasinya (terkasesnya) aplikasi e-stunting baik berbasis website dan berbasis android, sesuai dengan spesifikasi fungsi dan keamanan yang telah ditetapkan.	50.000.000	APBN (DAK Non Fisik Stunting)	Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
11	Penciptaan pelayanan cepat, tepat, mudah dan murah	SI ELEN (Sistem Informasi Electric Law Education)	Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas	Kemacetan berkurang; Pelanggaran lalu lintas Berkurang		APBD	Dinas Perhubungan	Pihak ketiga	Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif Smart City	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
12	Pengendalian disiplin dan pengoperasian angkutan umum di jalan raya	E-Uji	Pelayanan lebih efisien dan mudah - Pergantian dari buku uji KIR menjadi smart card; - Pembayaran beralihdari non tunai ke pembayaran tunai. - Pendaftaran bida dilakukan secara online.	Pelayanan lebih transparan, cepat dan efisien	300.000.000	APBD	Dinas Perhubungan	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
13	Penciptaan pelayanan cepat, tepat dan efisien	SIMANTAP	Untuk pemutakhiran data angkudes	Pelayanan lebih transparan, cepat dan efisien.	30.000.000	APBD	Dinas Perhubungan	Pihak Ketiga	Jangka Pendek

3.4.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Living*

Tabel 8 Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Living* dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2021-2022

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
1	Penyusunan /pembangunan Sistem Informasi Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Sistem informasi Database Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	Laporan akhir pelaksanaan Bantuan Keuangan Kabupaten Pati	Untuk mengetahui data base Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Pedesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati	Proses Pengajuan Proposal dan laporan akhir pelaksanaan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati dapat diperoleh secara up to date dan lebih cepat.	30.000.000	APBD	DPUTR	Pihak Ketiga	Jangka Pendek/Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
2	Penyusunan sistem informasi/data base jalan; Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan	Database Jalan dan Jembatan	Menyediakan database jalan dan jembatan yang akurat	Proses perencanaan dan penanganan jalan dan jembatan lebih cepat dan tepat	50.000.000	APBD	DPUTR	Pihak Ketiga	Jangka Pendek/ Jangka Menengah
3	Penyusunan informasi /database Tata Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Pati	Menyediaan data /informasi perencanaan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pati	Mempercepat proses penyebarluasan informasi rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Pati yang mudah diakses oleh masyarakat, pelaku usaha dan investor.	Laporan ijin Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Pati	50.000.000	APBD	DPUTR	Pihak Ketiga	Jangka Pendek/ Jangka Menengah
4	Pendaftaran Online Rawat Jalan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Mempercepat pelayanan, memberikan kemudahan pendaftaran	Kepuasan Pelanggan	Pendaftaran Online Rawat Jalan	15.000.000	BLUD	UPT RAA Soewondo	Pihak Ketiga	Jangka pendek- Menengah 2022-2023
5	E-RM Rawat Jalan dan Rawat Inap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kelengkapan catatan medis pasien, kemudahan akses data pasien dan dapat meningkatkan keamanan pasien yang baik sehingga sangat mendukung penegakan keputusan klinis serta dapat meningkatkan keamanan	Kepuasan pelanggan dan kepuasan pengguna Rekam Medis (PPA)	Elektronik – Rekam Medis Pasien	30.000.000	BLUD	UPT RAA Soewondo	Pihak Ketiga	Jangka Pendek- Menengah 2022-2023

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
6	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Mempercepat proses pengaduan masyarakat dan penanganan oleh petugas	Banyaknya pengguna SIAPak, Waktu penanganan aduan singkat	Tertanganinya aduan singkat masyarakat tepat waktu	30.000.000	APBD	Satpol PP	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
7	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penanggulangan Bencana	SifaNa (Smart Informasi Bencana)	Untuk penanganan dini potensi bencana banjir, dari mulai peringatan, kesiapsiagaan hingga penanganan darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Pati	Untuk mengurangi dampak negatif akibat bencana banjir yang timbul secara cepat, tepat, efektif dan efisien	75.000.000	APBD	BPBD	Pihak ke - 3 (tiga) untuk aplikasi dan komunitas relawan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jangka Menengah (2023)
8	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pasien pada lansia dengan mengurangi resiko	Terwujudnya kemampuan pelayanan Geriatri tingkat lengkap sesuai PMK 79 tahun 2014	Pasien Lansia	50.000.000	APBD	UPT. RSUD Kayen	Pihak Ketiga	Jangka Pendek dan menengah 2022-2023

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
9	Penyediaan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		SI GARDA	Terselenggaranya pelayanan terpadu bagi penderita kegawat daruratan sehari hari maupun keadaan bencana	Cakupan Pelayanan Kegawat daruratan dan Bencana terlayani (jumlah kasus, kecepatan penanganan, prosentase jumlah korban yang di tangani)	131.903.500	APBD	Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Diskominfo dan Pihak Ketiga	Jangka Pendek
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		SIG (Sistem Informasi Geografis) STUNTING	Tervalidasinya data stunting gizi darisumber data eppgm, dengan menggunakan metode validasi AGPS berbasis android, melalui : a. Terbentuknya aplikasi e-stunting berbasis android untuk memetakan latitute dan langitute status gizi nak balita di suatu wilayah, b. Terbentuknya aplikasi peta stunting berbasis website dengan pewarnaan berdasarkan kriteria stunting yang telah di tetapkan. Terbentuknya kelompok tenaga validator pemetaan stunting anak balita dalam suatu wilayah menggunakan aplikasi android e-stunting.	Terpublikasinya (terkasesnya) aplikasi e-stunting baik berbasis website dan berbasis android, sesuai dengan spesifikasi fungsi dan keamanan yang telah di tetapkan.	50.000.000	APBN (DAK Non Fisik Stunting)	Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Pihak Ketiga	Jangka Pendek

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
11	Penciptaan pelayanan cepat, tepat, mudah dan murah	Program peningkatan pelayanan angkutan	SI ELEN (Sistem Informasi Electric Law Education)	Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas	Kemacetan berkurang; Pelanggaran lalu-lintas berkurang		APBD	Dinas Perhubungan	Pihak ketiga	Jangka Pendek
12	Pengendalian disiplin dan pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Program peningkatan pelayanan angkutan	e-Uji	Pelayanan lebih efisien dan mudah, - Pergantian dari buku uji KIR ke smart card; - Pembayaran beralih dari non tunai ke pembayaran tunai. - Pendaftaran Bisa secara online	Pelayanan lebih transparan, cepat dan efisien	300.000.000	APBD	Dinas Perhubungan	Pihak Ketiga	Jangka Pendek
13	Penciptaan pelayanan cepat, tepat dan efisien	Program peningkatan pelayanan angkutan	SIMANTAP	Untuk pemutakhiran data angkudes	Pelayanan lebih transparan, cepat dan efisien	30.000.000	APBD	Dinas Perhubungan	Pihak Ketiga	Jangka Pendek

3.5. *Smart Society*

Smart Society sebagai bagian dari *Smart City* merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari *Smart Society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *Smart Society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

Adapun tujuan dari *Smart Society* ini yaitu:

1. Mewujudkan interaksi masyarakat yang efektif dan efisien (*community*) melalui strategi:
 - a. Menyediakan akses internet yang terhubung antar tetangga;
 - b. Menyediakan akses internet bagi masyarakat umum;
 - c. Menyediakan Sarana dan pendukung dan penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia penyuluh Ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan (formal dan informal), melalui strategi:
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengajar;
 - b. Penyediaan internet di tempat pendidikan;
 - c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi penjaga situs-situs budaya dan memberikan publikasi informasi tentang situs-situs budaya;
 - d. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
3. Mewujudkan sistem keamanan dan tanggap darurat masyarakat (*security*), melalui strategi sebagai berikut
 - a. Mengaktifkan kelompok siskamling;
 - b. Pembuatan *Earli Warning System (EWS)*;

4. Peningkatan pemberdayaan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial), melalui strategi sebagai berikut:
 - a. pelatihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (SDM PMKS);
 - b. pelatihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (SDM PMKS).

3.5.1. Kegiatan Pembangunan Smart Society

Tabel 9 Kegiatan Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Society

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif Smart City	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
1	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Otomasi Perpustakaan (inlis lite)	Mempermudah pengguna perpustakaan dalam mengakses informasi ,efektivitas dan efisiensi layanan perpustakaan, meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan.	meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dan meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan.	10.000.000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Pihak Ketiga	jangka pendek
2	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah.	1 Pati Pintar	Menyediakan koleksi buku e-book berbasis aplikasi android yang dapat di manfaatkan pengguna tanpa terkendala tempat dan waktu.	Meningkatnya jumlah pengunjung melalui aplikasi	56.750.000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Pihak Ketiga	jangka pendek
3	Penyediaan informasi Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten.	Sistem Informasi Kearsipan Daerah(SIKD)	mempermudah akses arsip daerah	Meningkatnya jumlah arsip yang dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem aplikasi	7.000.000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Pihak Ketiga	jangka pendek
4	Penyediaan informasi , akses dan layanan kearsipan tingkat kabupaten	ARDIPA	Mempermudah layanan arsip secara digital	Meningkatnya jumlah arsip yang dapat diakses oleh masyarakat melalui Sistem Aplikasi	8.000.000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan		jangka pendek

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
5	Penilaian dan penetapan autentitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	ARDILEC	Penyelamatan arsip pertanahan letter C Desa di Kabupaten Pati	Meningkatnya arsip vital Desa (letter C) yang dialihmediakan.	15.000.000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan		jangka pendek
6	Peningkatan kemampuan petugas penginputan data kekerasan berbasis gender dan anak	Arus Pelaporan Data Kekerasan PPPA	Mempermudah masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada perempuan dan anak dengan cepat	Arus data pelaporan cepat, akurat dan tertangani dengan baik	200.000.000	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana	Pihak Ketiga (untuk aplikasi), DINSOSP3AKB untuk kegiatan pembentukan, pelatihan dan sosialisasi kader tingkat desa / kelurahan (401 desa dan 5 kelurahan)	Jangka Menengah
7	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas	Mengetahui secara cepat jumlah ormas	Jumlah ormas tercatat	798.861.000	APBD	Badan Kesbangpol	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
8	Pengendalian dan pembinaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (PPPMI)	Peta Penyebaran Pekerja Migran Indonesia	Untuk mengecek keberadaan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, sehingga jika ada masalah cepat terdeteksi dan ditangani	Prosentase pekerja migran ilegal menurun	50.000.000	APBD	Disnaker	Pihak Ketiga	Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif Smart City	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
9	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Sistem Informasi Lowongan Kerja	Memudahkan masyarakat mengetahui informasi lowongan kerja	Masyarakat secara cepat mendapat informasi lowongan kerja, bagi perusahaan untuk mengiklankan / menginformasikan kepada masyarakat	50.000.000	APBD	Disnaker	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
10	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Sistem pengaduan pekerja / buruh terkait hubungan industrial	Memudahkan pekerja dalam mengadukan masalah yang adaterhadap masalah yang ada di perusahaan	Laporan cepat diterima oleh Dinas Tenaga Kerja	50.000.000	APBD	Disnaker	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
11	Peningkatan kemampuan (capacity Building) petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sistem Informasi Santunan Kematian	Mempermudah masyarakat untuk pengajuan santunan kematian dan mempermudah pengawasan oleh petugas verval	Masyarakat cepat menerima santunan	61.711.600	APBD Kabupaten Pati	Dinsos P3AKB, Disdukcapil, BPKAD, Diskominfo, Kecamatan dan Desa	Pihak Ketiga	Jangka Pendek

3.5.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Society*

Tabel 10 Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Society* dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2021-2022

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
1	Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten.	Otomasi Perpustakaan (inlis lite)	Mempermudah pengguna perpustakaan dalam mengakses informasi, efektivitas dan efisiensi layanan perpustakaan, meningkatkannya jumlah pengunjung perpustakaan	meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dan meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan.	10,000,000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	pihak ketiga	jangka pendek
2	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Program Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten.	I Pati Pintar	Menyediakan koleksi buku e-book berbasis aplikasi android yang dapat di manfaatkan pengguna tanpa terkendala tempat dan waktu	Meningkatkan jumlah pengunjung melalui aplikasi.	56.750.000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	Pihak Ketiga	jangka pendek
3	Penyediaan Informasi Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten	Program Pengelolaan Arsip	Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)	Mempermudah akses terhadap arsip daerah	meningkatnya jumlah arsip yang dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem aplikasi	7.000.000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	pihak ketiga	jangka pendek
4	Penyediaan Informasi Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten	Program Pengelolaan Arsip	ARDIPA	Mempermudah layanan arsip secara digital	Meningkatnya jumlah arsip yang dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi.	8.000.000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan		Jangka pendek

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
5	Penilaian dan penetapan autentitas arsip statis sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	ARDILEC	Penyelamatan arsip pertanahan letter C Desa di Kabupaten Pati	Meningkatnya arsip vital desa (Letter C) yang dialihmediakan	15.000.000	APBD	Dinas Kearsipan dan perpustakaan		Jangka pendek
6	Peningkatan kemampuan petugas penginputan data kekerasan berbasis gender dan anak	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Arus Pelaporan Data Kekerasan	Mempermudah masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada perempuan dan anak dengan cepat	Arus data pelaporan cepat, akurat dan tertangani dengan baik	200.000.000	APBD	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan Keluarga Berencana	Pihak Ketiga (untuk aplikasi), DINSOSP3AKB untuk kegiatan pembentukan, pelatihan dan sosialisasi kader tingkat desa / kelurahan (401 desa dan 5 kelurahan)	Jangka Menengah
7	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Program Perberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Mengeta-hui secara cepat jumlah ormas	Jumlah ormas tercatat	Data Ormas	798.861.000	APBD	Badan Kesbangpol	Pihak Ketiga	Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
8	Pengendalian dan pembinaan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (PPPMI)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Peta Penyebaran Pekerja Migran Indonesia	Untuk mengecek keberadaan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, sehingga jika ada masalah cepat terdeteksi dan ditangani	Prosentase pekerja migran ilegal menurun	50.000.000	APBD	Disnaker	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
9	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Sistem Informasi Lowongan Kerja	Memudahkan masyarakat mengetahui informasi lowongan kerja	Masyarakat secara cepat mendapat informasi lowongan kerja, bagi perusahaan untuk mengiklankan / menginformasikan kepada masyarakat	50.000.000	APBD	Disnaker	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
10	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial.		Sistem Pengaduan Pekerja/ buruh terkait hubungan industrial	Memudahkan pekerja dalam mengadakan masalah yang ada terhadap masalah yang ada di Perusahaan	Laporan cepat di terima oleh Dinas Tenaga Kerja	50.000.000	APBD	Disnaker	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
11	Peningkatan kemampuan (capacity Building) petugas dan pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS) lainnya	Sistem Informasi Santunan Kematian (Pati Santun)	Memperudahkan masyarakat untuk pengajuan santunan kematian	Masyarakat cepat menerima santunan	61.711.600	APBD Kabupaten Pati	Dinsos P3AKB, Disdukcapil, BPKAD, Diskominfo, Kecamatan dan Desa	Pihak Ketiga	Jangka Pendek

3.6. *Smart Environment*

Dimensi keenam dalam sebuah *Smart City* adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *Smart Environment* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang *Smart City* yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Sasaran dari *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan dari *Smart Environment* ini yaitu:

1. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang memadai, melalui strategi:
 - a. Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau di semua kawasan sesuai Standar Pelayanan Minimal Ruang Terbuka Hijau;
 - b. Optimalisasi Penerangan Jalan Umum skala perkotaan dan kawasan;
 - c. Mengintegrasikan semua unsur yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya yang ada baik sumber daya kehutanan, kelautan, dan sumber air bersih;
 - d. Optimalisasi penanganan sampah sampai ditingkat desa/kelurahan dari sumber sampah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir;
 - e. Optimalisasi pengelolaan air limbah dalam lingkungan permukiman;
 - f. Penanganan drainase skala perkotaan dan kawasan permukiman;
 - g. Perlindungan terhadap sumber air (mata air) dan identifikasi titik sumber air baku (air tanah) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - h. Peningkatan jaringan air bersih di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - i. Pembangunan, Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur keairan (bendungan, embung, saluran irigasi teknis dan non teknis);
 - j. Menyesuaikan pembangunan lingkungan berdasarkan daya dukung lahan;
 - k. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, melalui strategi:

- a. Meningkatnya penanganan pencemaran lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah;
- c. Pemanfaatan potensi bahan bakar residu untuk penyediaan bahan bakar industri/perkebunan.

3.6.1. Kegiatan Pembangunan *Smart Environment*

Tabel 11 Kegiatan Pembangunan *Smart City* pada Elemen *Smart Environment*

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif <i>Smart City</i>	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.	Propel PSU (Program Peduli Lingkungan PSU)	Meningkatkan responsivitas Pemda dalam menanggapi keluhan warga terkait kondisi infrastruktur yang layak di lingkungan kelurahan dan perumahan	Infrastruktur terawat dan lingkungan tertata; keluhan masyarakat segera ditangani	10.678.525.000	APBD Kabupaten	Disperkim	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (Pati Bebas Kumuh)	Tercapainya 0 % kumuh di Kabupaten Pati	Peningkatan score di 22 desa/kelurahan kumuh di 7 (tujuh) kecamatan sekabupaten Pati hingga dibawah nilai 19	20.000.000.000	APBN dan APBD	DISPERKIM	Kementerian PUPR (Satker PKP) dan BKM/LKM	Jangka Menengah
3	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	E-Ling (lingkungan)	Memudahkan pengaduan terhadap masalah lingkungan hidup, pelayanan Ijin Lingkungan, dan ijin PPLH (Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup).	Pengurusan Ijin lingkungan dan Ijin PPLH dilakukan secara online dan pengaduan masyarakat sudah terdata dan terlayani		APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan sampah	Bank Sampah Induk	Memudahkan pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan /atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomi.	Jumlah sampah yang dapat didaur ulang dan/atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomis.		APBD	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jangka Menengah
5	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian emisi GRK , mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	PROKLIM (Program Kampung Iklim)	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	Apresiasi Proklam dari KLHK		APBD	Dinas Lingkungan	Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Nama Inisiatif Smart City	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Time Line
6	Koordinasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Sistem Informasi Sinergi Infrastruktur	Menyediakan single data akurat terkait perencanaan dan pembangunan infrastruktur	Data yang terupdate	110.000.000	APBD	Bappeda	Tenaga Ahli	Jangka Menengah

3.6.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Environment*

Tabel 12 Sinkronisasi Program dan Kegiatan *Smart Environment* dengan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2021-2022

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Dimensi <i>Smart City</i>	OPD	Kerja Sama	Time Line
1	Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Propel PSU (Program Peduli Lingkungan PSU)	Meningkatkan responsivitas Pemda dalam menanggapi keluhan warga terkait kondisi infrastruktur yang layak di lingkungan kelurahan dan perumahan	Infrastruktur terawat dan lingkungan tertata; keluhan masyarakat segera ditangani	10.678.525.000	APBD Kabupaten	Smart Environment	Disperkim	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (Pati Bebas Kumuh)	Tercapainya 0% kumuh di Kabupaten Pati	Peningkatan score di 22 desa/kelurahan kumuh di 7 (tujuh) kecamatan sekabupaten Pati hingga dibawah nilai 19	20.000.000.000	APBN dan APBD	Smart Environment	DISPERKIM	Kementerian PUPR (Satker PKP) dan BKM/LKM	Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Dimensi Smart City	OPD	Kerja Sama	Time Line
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	E-Ling lingkungan	Memudahkan pengaduan terhadap masalah lingkungan hidup, pelayanan Ijin Lingkungan, dan ijin PPLH (Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup).	pengurusan Ijin lingkungan dan Ijin PPLH dilakukan secara online dan pengaduan masyarakat sudah terdata dan terlayani		APBD	Smart Environment	Dinas Lingkungan Hidup	Pihak Ketiga	Jangka Menengah
4	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Pengelolaan Sampah	Bank Sampah Induk	Memudahkan pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan / atau digunakan yang memiliki nilai ekonomi.	Jumlah sampah yang dapat didaur ulang dan / atau digunakan yang memiliki nilai ekonomi		APBD	Smart Environment	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jangka Menengah

No.	Kegiatan	Sinkronisasi Program RPJMD	Keluaran	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Dimensi Smart City	OPD	Kerja Sama	Time Line
5	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi GRK mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Proklam (Program Kampung Iklim)	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Proklam dari KLHK			Smart Environment	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jangka Menengah
6	Koordinasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Sistem Informasi Sinergi Infrastruktur	Menyediakan single data akurat terkait perencanaan dan pembangunan infrastruktur	Data yang terupdate	110.000.000	APBD	Smart Environment	Bappeda	Tenaga Ahli	Jangka Menengah

BAB IV

RENCANA AKSI SMART CITY

KABUPATEN PATI

4.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan *Smart City*

Rencana pengembangan *Smart City* Pati untuk kebijakan cukup ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati. Adapun yang perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Pati ditampilkan pada Tabel 13 sebagai berikut. Dari Tabel 13 diturunkan dalam bentuk pelaksanaan teknis yaitu Standar Operasional Prosedur.

Tabel 13 Rekomendasi Suprastruktur *Smart City* Pati

No	Kebijakan
1	Organisasi Pengelola <i>Smart City</i> : Dewan <i>Smart City</i> dan Tim Pelaksana Pengembangan <i>Smart City</i> Pati yang terdiri dari <i>Smart Governance</i> , <i>Smart Branding</i> , <i>Smart Economy</i> , <i>Smart living</i> , <i>Smart Society</i> , <i>Smart Environment</i> . Ketetapan Visi dan Misi, Bentuk Organisasi, Tupoksi, Indikator keberhasilan, Tunjangan Kinerja, dan Hubungan dengan Perangkat Daerah / Unit Kerja.
2	Aplikasi <i>Smart Governance</i> , <i>Smart Branding</i> , <i>Smart Economy</i> , <i>Smart living</i> , <i>Smart Society</i> , dan <i>Smart Environment</i> terintegrasi.
3	Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi terpadu
4	Standardisasi metadata
5	Aset Informasi Daerah
6	Pemanfaatan software Legal (<i>Open Source</i> dan <i>Proprietary</i>)
7	Pemanfaatan akses Informasi
8	Keamanan Informasi dan <i>Incident handling</i>
9	Layanan Publik berbasis elektronik
10	Proses Birokrasi berbasis Elektronik / Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk kelembagaan, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Diskominfo bahwa telah terbentuk Diskominfo Kabupaten Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pati memiliki berbagai Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, antar Perangkat Daerah akan memiliki kepentingan teknis dan administrasi masing-masing, maka perlu diatur koordinasinya untuk bisa bersinergi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

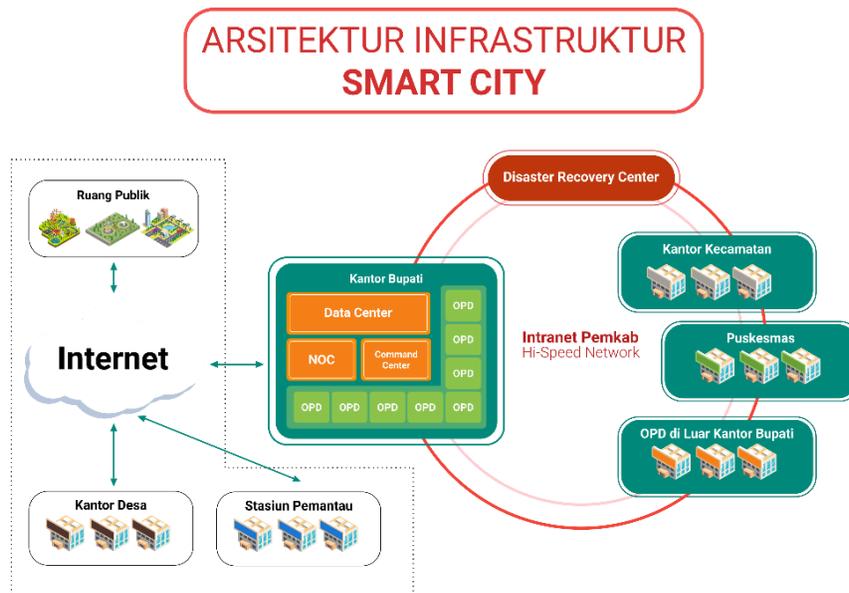
Semua Perangkat Daerah selain Diskominfo merupakan pemilik data/informasi dan proses birokrasinya menggunakan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi. Berikut adalah faktor-faktor yang harus dipatuhi dalam usaha transformasi proses birokrasi dan layanan publik dari manual menjadi berbasis elektronik :

Tabel 14 Persyaratan Transformasi Birokrasi Berbasis Elektronik

No	Persyaratan Transformasi Birokrasi Berbasis Elektronik
1	Semua Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Diskominfo dalam memanfaatkan sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pati.
2	Data, informasi, dan proses birokrasi dimiliki oleh Perangkat Daerah Sedangkan Diskominfo berwenang untuk sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3	Proses bisnis <i>re-engineering</i> yaitu melakukan inventarisasi proses birokrasi terkini yang bisa diotomatisasikan menjadi sistem informasi.
4	Pengelola data yang berfungsi untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Akuisisi dan validasi data dasar; b. Kebijakan data/informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data melalui sistem informasi; c. Kebijakan pemanfaatan dan distribusi data; d. Pengamanan dan pemeliharaan data; e. Pengembangan sistem terintegrasi; f. Penetapan proses yang akan dijadikan modul sistem informasi.

5	<p>Perangkat Daerah berkoordinasi dengan tim teknis pengembangan sistem Diskominfo dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan data; b. Proses bisnis (proses kerja sistem); c. Metodologi; d. <i>Platform</i> (bahasa pemrograman, database engine, sistem aplikasi, dll); e. Pelaksana; f. Kelayakan Anggaran; g. Pengelolaan sistem; h. Sarana dan prasarana sistem (server, jaringan, PC terminal, dll); i. Ketersediaan sistem di pasaran.
6	<p>Perangkat Daerah juga berkoordinasi dengan Diskominfo untuk mendapatkan ijin kelayakan tentang kebutuhan <i>software proprietary</i> dan aplikasi dari pemerintah pusat atau provinsi untuk dianalisa integrasi dengan sistem yang sudah ada.</p> <p>Perangkat Daerah pemilik data dan pemilik proses birokrasi juga berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain dalam hal akuisisi data, pengelolaan dan tanggung jawab kepemilikan data / informasi / proses birokrasinya.</p>
7	<p>Selanjutnya untuk pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dimana semua Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Diskominfo untuk hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kapasitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dibutuhkan; b. Jumlah dan kualitas media komunikasi data; c. Tingkat keamanan; d. Sistem jaringan yang dibutuhkan; e. Kapasitas <i>hardware</i> dan <i>software</i>; f. Spesifikasi teknis kebutuhan pekerjaan; g. Mekanisme pemeliharaan, pengoperasian dan pengendaliannya.
8	<p>Semua Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Diskominfo dalam melaksanakan pengadaan, perawatan dan pengendalian infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.</p>

4.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung *Smart City*



Gambar 3 Komponen Infrastruktur

4.2.1. *Data Center Daerah (Pusat Data Daerah)*

Kabupaten Pati perlu menyediakan pusat data daerah yang dapat dimanfaatkan bersama oleh seluruh aplikasi *Smart City*. Pusat data dimaksud akan menyediakan kapasitas penyimpanan (*storage*), pemrosesan (*computing*), dan distribusi data yang dibutuhkan oleh aplikasi-aplikasi *Smart City*.

Pusat Data dimaksud setidaknya memiliki komponen dan perannya sebagai berikut:

1. *Database Server*, menyediakan kapasitas untuk penyimpanan data pokok, data transaksi, analisis dan pelaporan untuk seluruh aplikasi *Smart City*;
2. *Application Server*, menyediakan *back end* API dan *front end* bagi aplikasi *Smart City*;
3. *File sharing server*, menyediakan solusi *cloud* untuk penyimpanan bersama arsip-arsip penting daerah;
4. *Generic hosting service*, menyediakan solusi hosting untuk aplikasi-aplikasi generik *off-the-shelf* pendukung *Smart City*;

5. *Mail server*, menyediakan fasilitas email resmi di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati;
6. *Domain Name Server*, menyediakan layanan domain resmi untuk memudahkan pemberian alamat layanan *Smart City*;
7. *Firewall*, menyediakan layanan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aplikasi layanan *Smart City*.

Kabupaten Pati telah membangun Gedung Server Terpadu (*Data Center*) pada Tahun 2020 yang ditujukan untuk integrasi server server yang sebelumnya dikelola oleh masing masing Perangkat Daerah.

Untuk pelaksanaan fungsi *Data Center* seperti tersebut diatas maka secara bertahap dilakukan menyesuaikan dengan anggaran di Diskominfo Kabupaten Pati.

4.2.2. Jaringan

Ketersediaan ini jaringan ini mutlak diperlukan untuk pemanfaatan sumber daya yang dibangun melalui inisiatif *Smart City* secara optimal. Infrastruktur jaringan yang akan dibangun dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yakni : Infrastruktur Jaringan Intra OPD (Intranet Kabupaten) dan Infrastruktur Jaringan Internet Masyarakat.

1. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan intra pemerintah adalah jaringan komputer yang menghubungkan seluruh kantor penyelenggara pemerintahan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati pada level kabupaten dan kecamatan. Jaringan dimaksud dapat dibangun baik melalui jalur privat (baik fisik atau virtual) maupun publik (internet).

Kapasitas jaringan yang disediakan harus diproyeksikan untuk mampu menangani lalu lintas data dalam kapasitas besar, termasuk diantaranya untuk menyediakan jalur komunikasi VoIP dan *Video Conference* dalam lingkungan Perangkat Daerah di Kabupaten Pati.

Jaringan Intra Pemerintah telah dibangun di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati pada Tahun 2019 berupa Jaringan Fiber Optik untuk 29 Perangkat Daerah.

Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah dilanjutkan pada Tahun 2021 berupa pembangunan Jaringan Fiber Optik kedua pada Kantor Kecamatan dan Jaringan Radio untuk 5 kantor Kecamatan.

2. Jaringan Internet Masyarakat

Adalah infrastruktur jaringan internet yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan perangkat pemerintahan pada tingkat desa/kelurahan. Infrastruktur ini perlu disediakan untuk memastikan tersedianya jalur lalu lintas data hingga pada tingkatan yang terendah dengan jangkauan hingga titik-titik yang tergolong jauh dari pusat pemerintahan (*remote*). Tersedianya jalur tersebut akan memberikan manfaat antara lain:

- a. Memberikan kemudahan akses layanan bagi perangkat pemerintahan maupun masyarakat di seluruh wilayah kabupaten untuk memanfaatkan layanan pemerintah;
- b. Memungkinkan pemantauan kondisi daerah terotomasi menggunakan teknologi seperti *video surveillance*, stasiun monitoring cuaca dan iklim, monitoring kondisi lahan pertanian, hewan ternak, kondisi saluran irigasi dan lainnya (*Internet of Things*);
- c. Mendorong munculnya inovasi pelayanan masyarakat di tingkat desa/kelurahan yang diprakarsai secara mandiri oleh pemerintah setempat dalam berbagai bentuk seperti implementasi Sistem Informasi Desa, *public hotspot*, perpustakaan digital desa, rumah pintar dan lainnya.

4.2.3. Pusat Kendali Jaringan & Data

Infrastruktur pusat kendali jaringan dan data dibangun untuk memudahkan pemantauan kondisi operasional pusat data dan jaringan intra pemerintah untuk menjamin ketersediaan (*availability*) seluruh infrastruktur pendukung *Smart City*.

NOC dan SOC telah dibangun di dalam Gedung Server Terpadu dengan fungsi yang terus ditingkatkan bertahap menyesuaikan dengan tahapan pembangunan jaringan internet.

4.2.4. Pusat Kendali Operasi (*Operation Control Center*)

Infrastruktur pusat kendali operasi *Smart City* merupakan fasilitas terpusat dimana seluruh sistem *Smart City* dapat dipantau. Pusat kendali operasi dilengkapi dengan berbagai tampilan yang menyajikan informasi *real-time* dari perangkat dan sistem yang tersebar di seluruh Pati sehingga kondisi daerah dapat dipantau tanpa perlu menuju lokasi bersangkutan.

Pati Command Center telah dibangun di Lingkungan Gedung Sekretariat Daerah dengan fungsi yang terus ditingkatkan bertahap menyesuaikan dsengan tahapan integrasi aplikasi dan *dashboard* aplikasi.

4.2.5. Disaster Recovery Center

Disaster Recovery Center melakukan replikasi dan *backup* secara berkala terhadap seluruh data yang tersedia di *data center*. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap terjadinya kejadian *force majeure* yang mengakibatkan gagalnya *data center* menyediakan layanan seharusnya. *Disaster Recovery Center* dirancang untuk mampu mengambil alih sementara peran *data center* hingga keadaan berhasil dipulihkan.

4.4 Rencana Pengembangan Perangkat Lunak Smart City



Gambar 4 Kerangka arsitektur perangkat lunak Smart City Kabupaten Pati

4.4.1. Standar Arsitektur

1. Penyimpanan Data

Data seluruh sistem harus disimpan pada *data center* secara terpusat untuk kemudahan integrasi dan pengelolaan data.

Pengecualian dapat diberikan kepada sistem-sistem khusus dengan karakter membutuhkan beban akses dan *availability* tinggi namun penggunaannya terpusat di satu lokasi, seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Khusus untuk sistem seperti ini, harus disediakan mekanisme sinkronisasi data dengan *data center*.

2. Akses & Keamanan Data

Akses dan pertukaran data dilakukan melalui API yang disediakan sebagai bagian dari infrastruktur *data center*. Komunikasi data harus dibangun dan memperhatikan prinsip-prinsip keamanan data dan jaringan baik dari sisi *Confidentiality, Integrity, Availability* dan *Authenticity*. Setiap komunikasi sistem melalui API harus dipastikan menggunakan protokol HTTPS.

3. Platform Perangkat Lunak

Platform *front end* perangkat lunak *Smart City* Kabupaten Pati disediakan dengan teknologi *web-based* dan/atau *mobile based*. Penggunaan *platform* berbasis *desktop* harus ditinggalkan untuk memudahkan kemungkinan pembaharuan, perawatan dan meminimalisir biaya, kecuali untuk kasus-kasus khusus dimana penggunaan kedua *platform* tersebut tidak dimungkinkan.

4.4.2. Klasifikasi Perangkat Lunak *Smart City*

1. Sistem Informasi Pengelolaan Data Induk Utama

Data induk utama kabupaten mencakup data-data utama yang menjadi rujukan lintas sektor. Karena menjadi rujukan lintas sektor, sistem informasi ini harus disediakan pada tahap awal dari rangkaian pengembangan sistem dalam inisiatif *Smart City* ini.

Data induk utama harus disusun dari *feed* basis data yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang secara nasional, untuk menjamin kemudahan integrasi dengan sistem informasi milik pemerintah di luar Kabupaten Pati, baik dengan memanfaatkan API yang tersedia maupun cara manual. Termasuk dalam kelompok ini adalah :

- 1) Data induk wilayah administratif, mencakup data kecamatan, kelurahan, desa, lingkungan, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- 2) Data induk kependudukan berisi data dasar penduduk Kabupaten Pati minimal mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan informasi yang tertera data-data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 3) Data induk organisasi pemerintahan, berisi data organisasi penyelenggara daerah di lingkup Kabupaten Pati minimal mencakup nama dan tupoksi Perangkat Daerah, struktur organisasi tiap-tiap Perangkat Daerah;
- 4) Data induk Aparatur Sipil Negara (ASN), berisi data dasar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Sistem Informasi Pengelolaan Data Induk Sektor

Data induk sektoral mencakup data-data sektoral yang dicatat, dimutakhirkan, dan dianalisis oleh masing Perangkat Daerah sesuai sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Penekanan pada data sektoral ini adalah kepemilikan data ada pada Perangkat Daerah tertentu sehingga tanggung jawab atas pengelolaan data ada pada Perangkat Daerah bersangkutan namun hak akses terhadap data bersangkutan juga dimiliki oleh Perangkat Daerah lain yang memiliki kepentingan atas data tersebut.

Sistem ini harus didesain untuk bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah secara dinamis sehingga setiap ada penambahan klasifikasi data tertentu, tidak perlu pengembangan sistem baru. Contoh yang termasuk ke dalam klasifikasi ini antara lain:

- 1) Database Kawasan Strategis Kabupaten;
- 2) Database obyek wisata;
- 3) Database infrastruktur pendukung pariwisata;
- 4) Database pelaku pariwisata;
- 5) Database klasifikasi komoditas;
- 6) Database kelompok tani;
- 7) Database kelompok peternak;
- 8) Database lahan pertanian dan kapasitas produksi;
- 9) Database peternakan dan kapasitas produksi;
- 10) Database pelaku usaha/penyedia jasa bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- 11) Database infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perikanan;
- 12) Database klasifikasi produk UMKM;
- 13) Database pelaku UMKM beserta jenis usaha, kapasitas usaha, beserta produk dan jasa yang ditawarkan;
- 14) Database pasar;
- 15) Database tenaga kerja;
- 16) Database infrastruktur jalan, jembatan;
- 17) Database peruntukan kawasan;
- 18) Database prasarana, sarana dan utilitas kawasan;
- 19) Database ruang terbuka hijau;
- 20) Database penerangan jalan umum;
- 21) Database infrastruktur keairan;
- 22) Database akses air bersih oleh rumah tangga;
- 23) Database kawasan kumuh perkotaan;
- 24) Database Rumah Tidak Layak Huni;
- 25) Database infrastruktur sanitasi dan drainase;
- 26) Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 27) Database produk hukum daerah;
- 28) Database Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.

3. Sistem Informasi Pencatatan Data Rutin

Sistem ini memfasilitasi pencatatan data-data yang dicatat secara rutin (reguler). Pencatatan dapat dilakukan baik dengan cara manual (*entry* oleh petugas melalui aplikasi) atau dengan mendapatkan *feed* data secara otomatis dari sistem lain (misal: *perangkat Internet of Things (IoT)*).

Jenis data yang data dikelola di dalam sistem ini sebagian besar adalah data-data statistik sektoral, dimana tanggung jawab atas data berada pada Perangkat Daerah dengan bidang yang bersesuaian.

Akses terhadap pencatatan data diberikan melalui API dari *data center*. Pilihan mekanisme pengiriman data sesuai karakter proses bisnis di lapangan, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Aplikasi pembantu dapat berupa aplikasi *front-end* berbasis web ataupun *mobile*.

Jenis data yang dikelola pada sistem ini harus dipahami sebagai sesuatu yang senantiasa berkembang, baik dari sisi kualitas (kedetailan data), maupun jenis data sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah. Hal ini berarti bahwa sistem ini harus disiapkan untuk terus-menerus berkembang.

Contoh yang termasuk dalam cakupan sistem ini antara lain:

- 1) Pencatatan data kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, dan lainnya;
- 2) Pencatatan data tarif dan biaya;
- 3) Data agenda dan *event* pariwisata;
- 4) Pencatatan harga pasar, baik untuk komoditas pangan, pertanian, peternakan dan lainnya;
- 5) Pencatatan data produksi;
- 6) Pencatatan distribusi bantuan kepada masyarakat;
- 7) Pencatatan data stok dan distribusi pangan;
- 8) Pencatatan data terkait cuaca, suhu, kondisi udara dan parameter lingkungan lainnya;
- 9) Data agenda kerja aparat pemerintahan.

4. Sistem Informasi dengan Alur Kerja (*Workflow*) Khusus

Sistem dengan *workflow* khusus adalah sistem spesifik yang diperuntukkan untuk mendukung proses bisnis tertentu di pemerintahan. Sistem ini dibangun secara terpisah dari sistem pengelolaan maupun pencatatan data untuk mengakomodasi kekhususan dari setiap proses bisnis. Contoh yang termasuk ke dalam kategori ini antara lain:

- 1) Sistem Layanan Pengajuan Perijinan dan Rekomendasi;
- 2) Sistem Layanan Pengaduan oleh Masyarakat;
- 3) Sistem Layanan Darurat;
- 4) Sistem Layanan Pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara;

- 5) Sistem Pencatat Kehadiran Guru dan Aparatur Sipil Negara;
- 6) Sistem Pengelolaan Aset Daerah;
- 7) Sistem Kepegawaian Daerah;
- 8) Sistem Perencanaan Daerah;
- 9) Sistem Keuangan Daerah;
- 10) Sistem Informasi Desa.

5. Sistem Pendukung Diseminasi Informasi

Sistem pendukung diseminasi informasi adalah sistem-sistem yang dibangun untuk memberikan informasi tertentu yang bersifat untuk konsumsi publik. Informasi yang disampaikan pada sistem ini dapat merupakan agregasi dari data yang telah disimpan pada sistem pengelolaan data induk, sektoral, dan pencatatan data rutin.

Berbagai bentuk dari sistem ini antara lain :

- 1) Website resmi masing-masing Perangkat Daerah;
- 2) Direktori data sektoral (misal: direktori UMKM, direktori pariwisata, direktori pertanian, dan sebagainya);
- 3) Sistem Informasi Geografis (Peta Kawasan Strategis, Peta Wisata, Peta Infrastruktur, dan sebagainya);
- 4) Etalase Komoditas dan Produk Unggulan;
- 5) Pusat arsip publik;
- 6) Perpustakaan digital daerah;
- 7) Sistem manajemen pengetahuan bagi aparat pemerintahan;
- 8) Pusat pembelajaran digital bagi masyarakat.

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang tersedia, diperlukan sebuah “pintu masuk” khusus, baik dalam bentuk Web Portal maupun Mobile Apps yang didalamnya berisi tautan (*links*) maupun ringkasan dan agregat informasi dari seluruh sistem yang ada dalam klasifikasi ini.

6. Sistem Pendukung Pelaporan dan Analisis

Sistem pendukung laporan dan analisis adalah sistem informasi untuk jajaran manajerial, yang menyajikan kemampuan agregasi dan analisis data dari seluruh data yang tersimpan pada *data center*. Termasuk ke dalam sistem ini antara lain:

- 1) *Dashboard Executive*;
- 2) *Online Analytical Processing (OLAP)*;
- 3) *Business Intelligence*;
- 4) *Data Mining*.

7. Sistem Pendukung Komunikasi & Kolaborasi

Termasuk ke dalam kategori ini adalah sistem yang digunakan untuk mendukung komunikasi dan kolaborasi baik di internal jajaran pemerintah kabupaten maupun dengan publik yakni :

- 1) Fasilitas email resmi Perangkat Daerah;
- 2) VoIP dan *Video Conference*;
- 3) Akun resmi media sosial.

8. Sistem Monitoring

Sistem monitoring yang dimaksud adalah sistem-sistem yang dibangun untuk melakukan pemantauan otomatis terhadap kondisi-kondisi yang perlu dipantau baik secara *real-time* maupun berkala. Termasuk ke dalam sistem ini adalah :

- 1) Sistem monitoring fasilitas publik;
- 2) Sistem monitoring lalu lintas;
- 3) Sistem monitoring indikator kebencanaan;
- 4) Sistem monitoring indikator lingkungan.

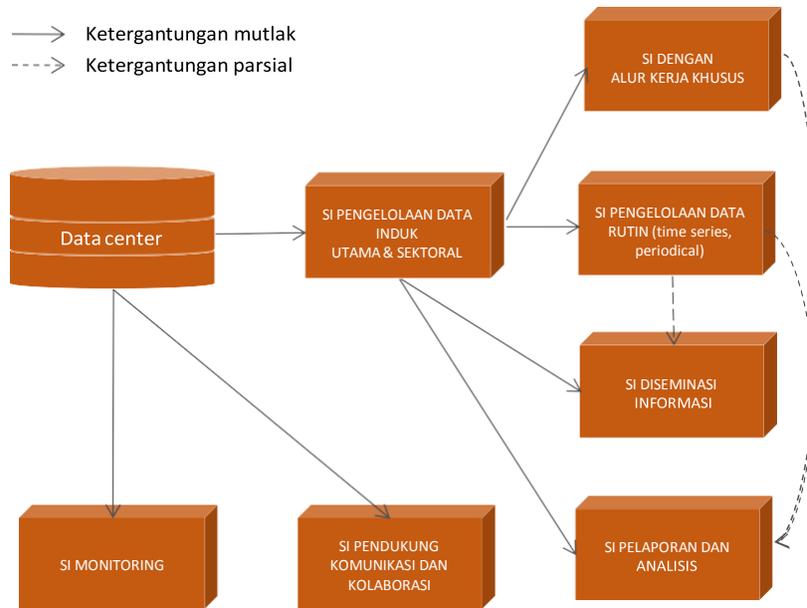
4.4.3. Tahapan pengembangan Perangkat Lunak *Smart City*

1. Prioritas Pengembangan

Prioritas pengembangan perangkat lunak *Smart City* disusun dengan memperhatikan setidaknya dua faktor yakni pola ketergantungan antar sistem dan prioritas pengembangan yang merujuk kepada Kawasan Strategis Kabupaten.

2. Pola Ketergantungan Antar Sistem

Perangkat lunak *Smart City* tidak berdiri sendiri-sendiri. Terdapat perangkat lunak yang memiliki ketergantungan terhadap keberadaan infrastruktur tertentu dan perangkat lunak lain, terutama dari sisi ketersediaan data. Secara garis besar ketergantungan tersebut dapat disajikan dalam diagram berikut.



Gambar 5 Pola Ketergantungan Antar Sistem

Ketergantungan mutlak menggambarkan bahwa sistem yang menjadi pendahulu (*predecessor*, pangkal panah) mutlak harus sudah ada sebelum sistem yang membutuhkan (*successor*, ujung panah). Sebagai contoh, pengembangan sistem untuk diseminasi informasi beserta sistem untuk pelaporan dan analisis dapat dimulai setelah data induk utama dan sektoral yang bersesuaian selesai dikerjakan. Seiring pengembangan, data-data dari hasil pencatatan data rutin juga dapat dimasukkan ke dalam sistem.

4.5 Rencana Penguatan Literasi *Smart City*

Selain literasi melalui Website <http://patikab.go.id>, penguatan literasi *Smart City* dilaksanakan paralel dengan penguatan komponen *Smart City* lainnya, seperti penguatan infrastruktur dan suprastruktur. Penguatan literasi dilaksanakan berkesinambungan melalui bimtek, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar tentang *Smart City*. Bimbingan Teknis, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* yang terkait.

Semua pengembangan aplikasi dan layanan publik *online* memerlukan sosialisasi dan *focus group discussion* pada awal pengembangan, saat uji coba, dan saat implementasi. Selanjutnya dilakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, dan pengamanan aplikasi.

Bimbingan Teknis, *focus group discussion*, sosialisasi, dan seminar tentang perkembangan teknologi, *trouble shooting* sistem, etika profesi, etika penyebaran dan penggunaan informasi. Untuk itu Diskominfo Kabupaten Pati memastikan adanya dokumentasi seperti *manual book*, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan buku petunjuk.

BAB V

PETA JALAN PEMBANGUNAN SMART CITY

5.1 Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek (Tahun 2021-2022)

No.	Nama Inisiatif Smart City	2021	2022
Smart Governance			
1	Daftar Siji Entuk Telu (TARJILU OKKE)	√	√
2	Layanan jemput bola e-KTP	√	√
3	Pengembangan layanan publik dengan tandatangan digital signature dan E- Retribusi IMB.	√	√
4	Temu bisnis investor Nasional UMKM dengan Pemerintah Kabupaten Pati pada Kegiatan Pati Bussines Forum.	√	√
5	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan Teknis LKPM On line	√	√
6	Pelayanan perizinan dan non perizinan	√	√
7	Pelayanan Kepegawaian Terpadu	√	√
8	MySIMPATI (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pati)	√	√
9	SIM UKPBJ	√	√
10	E-Consulting	√	√
11	E-Wadul	√	√
12	Aplikasi Permohonan Pelayanan Kecamatan	√	√
13	Aplikasi Satripasar dan Simpatik	√	√
14	WEB BPKAD	√	√
15	e - Bphtb	√	√
16	e -PBB	√	√
17	e-Trayek	√	√
18	Dokumen Informasi Jabatan	√	√
19	Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan	√	√
20	Dokumen Laporan SAKIP	√	√
21	E-Layang	√	√
22	Aplikasi Dashboard		√
23	SILATELI (Sistem Layanan Telekomunikasi)		
24	LARAGRAM (Layanan Radio Gram)	√	√
25	LATELIT (Layanan Telekomunikasi Satelit)		
26	LATERAPU (Layanan Terpadu Radio Pancar Ulang)	√	√
27	Layanan Counter Survelance (Kontra Pengindraan/ assesmen security)		
28	CSIRT(Computer Security Insident Responde Team)		
29	SOC(Security Operation Center)	√	√
30	LIGA TEKI (Libur Siaga Telekomunikasi dan Keamanan Informasi)	√	√
31	LAEKAMI (Layanan edukasi keamanan Informasi)		
32	LaDRC (Layanan Disaster Recovery System)		
33	Assesment / Maturiry Kami	√	√
34	TTE	√	√
35	Fire Wall		
36	Portal Satu Data Indonesia	√	√
37	Sedep Informasi (Serambi Depan Informasi)	√	√
38	Ruang Press Room	√	√
39	Rauang Literasi Masyarakat	√	√
40	Sistem Website PPID Kabupaten Pati	√	√
Smart Branding			
1	Promosi produksi jeruk pamelu bageng dan kelapa kopyor		
2	Kawasan peternakan unggas		
3	Portal Pati Smart City	√	√

No.	Nama Inisiatif Smart City	2021	2022
4	Desk Analisa Sosial Media		√
5	Festival Budaya Daerah		√
6	Proses boyongan dalam rangka peringatan hari jadi Pati		
7	E sarpras SMP		√

Smart Economy

1	SIPIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati)	√	√
2	Informasi Budidaya Ikan	√	
3	SIMAGNUM (Sistem Informasi Manajemen UMKM)	√	√
4	SIKOPI (Sistem Informasi Koperasi)	√	√
5	Informasi Ketahanan Pangan	√	√
6	Informasi Pangan Lokal		√
7	GOLEH	√	√
8	Pasar Puri Online (PAPIBEJO)	√	√
9	Cek Produk Pati	√	√

Smart Living

1	Sistem informasi Database Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Pedesaan	√	√
2	Sistem Informasi Database Jaringan Jalan dan Jembatan	√	√
3	Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Pati	√	√
4	Pendaftaran Online Rawat Jalan		√
5	E-Rekam Medis Pasien		√
6	SIAPak		
7	SifaNa (Smart Informasi Bencana)		
8	Sistem Informasi Santunan Kematian	√	√
9	Pasien Lansia		√
10	SI GARDA	√	√
11	SIG (Sistem Informasi Geografis) STUNTING	√	√
12	SI ELEN (Sistem Informasi Electric Law Education)	√	√
13	E-Uji	√	√
14	SIMANTAP	√	√

Smart Society

1	Otomasi Perpustakaan (inlis lite)		√
2	1 Pati Pintar		√
3	Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD)		√
4	ARDIPA	√	√
5	ARDILEC		√
6	Arus Pelaporan Data Kekerasan PPPA		
7	Ormas		
8	Peta Penyebaran Pekerja Migran Indonesia		
9	Sistem Informasi Lowongan Kerja		
10	Sistem pengaduan pekerja / buruh terkait hubungan industrial		

Smart Environment

1	Propel PSU (Program Peduli Lingkungan PSU)		√
2	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (Pati Bebas Kumuh)		√
3	E-Ling (lingkungan)		√
4	Bank Sampah Induk	√	√
5	PROKLIM (Program Kampung Iklim)	√	√
6	Sistem Informasi Sinergi Infrastruktur		√

5.2 Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah (Tahun 2023-2025)

No	Nama Inisiatif Smart City	2023	2024	2025
1	Daftar Siji Entuk Telu (TARJILU OKKE)	√		
2	Layanan jemput bola e-KTP	√		
3	Pengembangan layanan publik dengan tandatangan digital signature dan E- Retribusi IMB.	√		
4	Temu bisnis investor Nasional UMKM dengan Pemerintah Kabupaten Pati pada Kegiatan Pati Bussines Forum.	√		
5	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal dan Bimbingan Teknis LKPM On line	√		
6	Terlaksananya Pelayanan Publik yang mudah, cepat dan transparan.	√		
7	Pelayanan Kepegawaian Terpadu	√		
8	MySIMPATI (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pati)	√		
9	SIM UKPBJ	√		
10	E-Consulting	√		
11	E-Wadul	√		
12	Aplikasi Permohonan Pelayanan Kecamatan	√		
13	Aplikasi Satripasar dan Simpatik	√		
14	WEB BPKAD	√		
15	e - Bphtb	√		
16	e -PBB	√		
17	e-Trayek	√		
18	Dokumen Informasi Jabatan	√	√	√
19	Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan	√	√	√
20	Dokumen Laporan SAKIP	√	√	√
21	E-Layang	√	√	√
22	Apliaksi Dashboard	√	√	√
23	SILATELI (Sistem Layanan Telekomunikasi)	√	√	√
24	LARAGRAM (Layanan Radio Gram)	√		
25	LATELIT (Layanan Telekomunikasi Satelit)	√	√	√
26	LATERAPU (Layanan Terpadu Radio Pancar Ulang)	√	√	√
27	Layanan Counter Survelance (Kontra Pengindraan/ assesmen security)	√		
28	CSIRT(Computer SecurityInsident Responde Team)	√	√	√
29	SOC(Security Operation Center)	√		
30	LIGA TEKI (Libur Siaga Telekomunikasi dan Keamanan Informasi)	√		
31	LAEKAMI (Layanan edukasi keamanan Informasi)	√	√	√
32	LaDRC (Layanan Disaster Recovery System)	√	√	√
33	Assesment / Maturiry Kami	√	√	√
34	TTE	√		
35	Fire Wall	√	√	√
36	Portal Satu Data Indonesia	√		
37	Sedep Informasi (Serambi Depan Informasi)	√		
38	Ruang Press Room	√		
39	Rauang Literasi Masyarakat	√		
40	Sistem Website PPID Kabupaten Pati	√		
41	Promosi produksi jeruk pamelu bageng dan kelapa kopyor	√	√	√
42	Kawasan peternakan unggas	√	√	√
43	Portal Pati Smart City	√		
44	Desk Analisa Sosial Media	√		
45	Festival Budaya Daerah	√	√	√
46	Proses boyongan dalam rangka peringatan hari jadiPati		√	

No	Nama Inisiatif Smart City	2023	2024	2025
47	E sarpras SMP	√		
48	SIPIPA (Sistem Informasi Pelelangan Ikan Pati)			
49	Informasi Budidaya Ikan	√		
50	SIMAGNUM (Sistem Informasi Managemen UMKM)	√		
51	SIKOPI (Sistem Informasi Koperasi)	√		
52	Informasi Ketahanan Pangan	√		
53	Informasi Pangan Lokal	√		
54	GOLEH	√		
55	Pasar Puri Online (PAPIBEJO)	√		
56	Cek Produk Pati	√		
57	Sistem informasi Database Bantuan Keuangan Sarana dan Prasaranan Pedesaan	√	√	√
58	Sistem Informasi Database Jaringan Jalan dan Jembatan	√	√	
59	Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten Pati	√	√	√
60	Pendaftaran Online Rawat Jalan	√	√	√
61	E-Rekam Medis Pasien	√	√	√
	SIAPak	√	√	√
62	SlfaNa (Smart Informasi Bencana)	√	√	√
63	Sistem Informasi Santunan Kematian			
64	Pasien Lansia	√	√	√
65	SI GARDA	√		
66	SIG (Sistem Informasi Geografis) STUNTING	√		
67	SI ELEN (Sistem Informasi Electric Law Education)	√		
68	E-Uji	√		
69	SIMANTAP	√		
70	Otomasi Perpustakaan (inlis lite)	√		
71	1 Pati Pintar	√		
72	Sistem Informasi Kearsipan Daerah(SIKD)	√		
73	ARDIPA	√		
74	ARDILEC	√		
75	Arus Pelaporan Data Kekerasan PPPA	√	√	√
76	Ormas	√	√	√
77	Peta Penyebaran Pekerja Migran Indonesia	√	√	√
78	Sistem Informasi Lowongan Kerja	√	√	√
79	Sistem pengaduan pekerja / buruh terkait hubungan industrial	√	√	√
80	Propel PSU (Program Peduli Lingkungan PSU)	√		
81	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (Pati Bebas Kumuh)	√		
82	E-Ling (lingkungan)	√		
83	Bank Sampah Induk	√	√	√
84	PROKLIM (Program Kampung Iklim)	√	√	√
85	Sistem Informasi Sinergi Infrastruktur	√		

5.3 Program Unggulan Berkelanjutan

Kabupaten Pati dalam menjalankan program dan kegiatan yang tertuang dalam Masterplan *Smart City*, memiliki Program *Quick Win* yang merupakan program unggulan yang dilaksanakan dalam jangka pendek. Program *Quick Win Smart City* Kabupaten Pati terdiri dari 5 program yang masing-masing masuk dalam Dimensi *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Living*, dan *Smart Economy*.

Quick Win Smart City Kabupaten Pati dapat dilihat di tabel 15 berikut.

Tabel 15 Quick Win Smart City Kabupaten Pati

No	Program Quick Win	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Pelaksana
1	SIM ULP	<i>Smart Governance</i>	Proses pengadaan transparan dan akurat serta cepat	Setda Bag. Pengadaan barang dan Jasa
2	Portal Pati Smart City	<i>Smart Branding</i>	PATI dikenal dengan image yang baik dan meningkatkan daya saing PATI	Diskominfo
3	SI GARDA	<i>Smart Living</i>	Respon time < 10 menit ; Angka kematian dan kecacatan menurun	Dinkes
4	SIAPak	<i>Smart Living</i>	Banyanya pengguna SIAPak; waktu penanganan aduan singkat	Satpol PP
5	GOLEH	<i>Smart Economy</i>	Peningkatan transaksi serta peningkatan pendapatan UMKM	Disdagperin

Tabel 16 Program Unggulan Berkelanjutan Smart City Kabupaten Pati

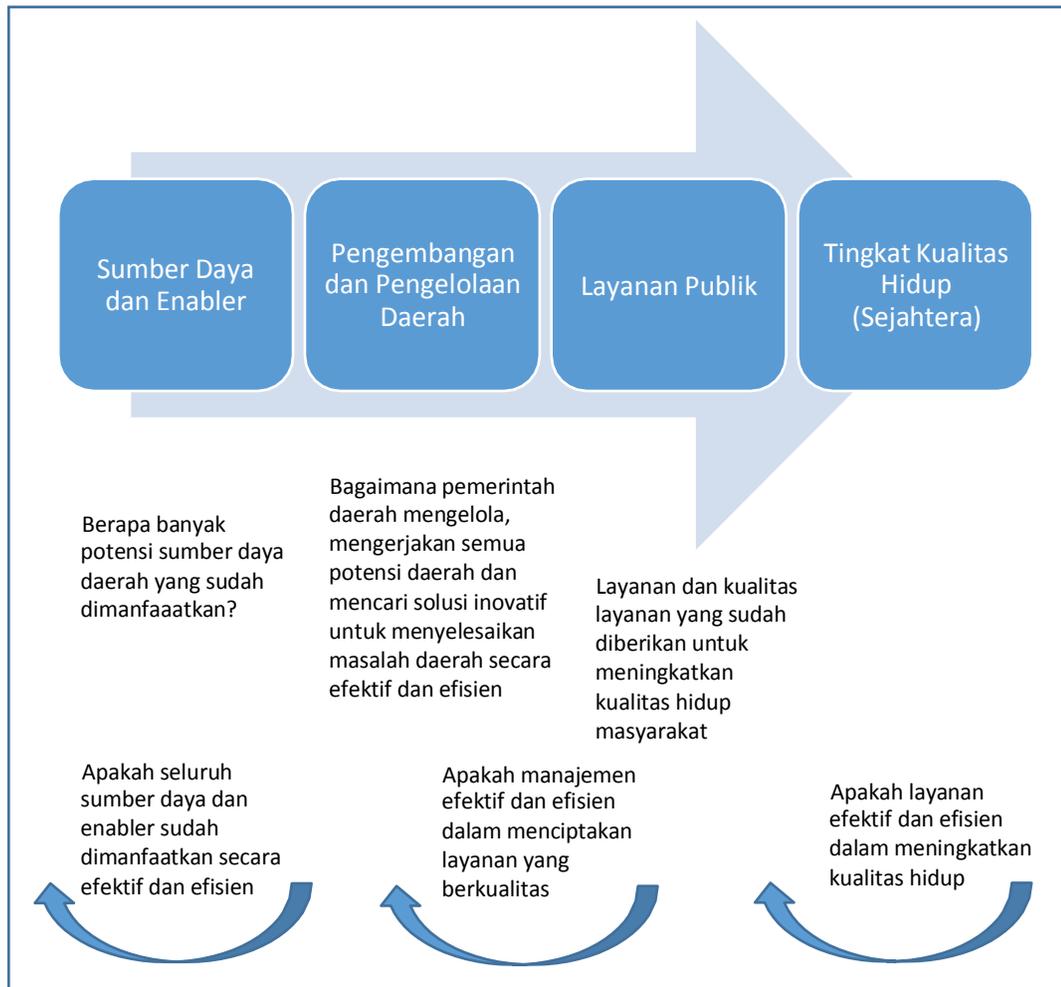
No	Program Unggulan Berkelanjutan	Dimensi	Indikator Keberhasilan	Pelaksana
1	SIM ULP	<i>Smart Governance</i>	Proses pengadaan transparan dan akurat serta cepat	Setda Bag. Pengadaan barang dan Jasa
2	Wisata Jollong	<i>Smart Branding</i>	PATI dikenal dengan image yang baik dan meningkatkan daya saing PATI	Disporapar
3	KIR Online	<i>Smart Living</i>	Respon time < 10 menit ; Angka kematian dan kecacatan menurun	Dinas Perhubungan
4	Pati Santun	<i>Smart Society</i>	Banyanya pengguna SIAPak; waktu penanganan aduan singkat	Dinas Sosial
5	SIPIPA	<i>Smart Economy</i>	Peningkatan transaksi serta peningkatan pendapatan UMKM	Dinas Kelautan dan Perikanan
6	Bank Sampah Induk	<i>Smart Environment</i>	Bank Sampah Induk (BSI)	Dinas Lingkungan Hidup

5.4. Pengukuran Keberhasilan Smart City

Dalam mengukur *Smart City* ada dua indikator utama yaitu indikator kualitas hidup dan indikator tingkat kematangan pengembangan *Smart City*. Indikator kualitas hidup akan mengukur hasil akhir dari berbagai upaya yang diharapkan yang pada akhirnya seluruh masyarakat Kabupaten Pati akan meningkat kualitas hidupnya. Sedangkan indikator yang kedua adalah akan mengukur sejauh mana tingkat kematangan

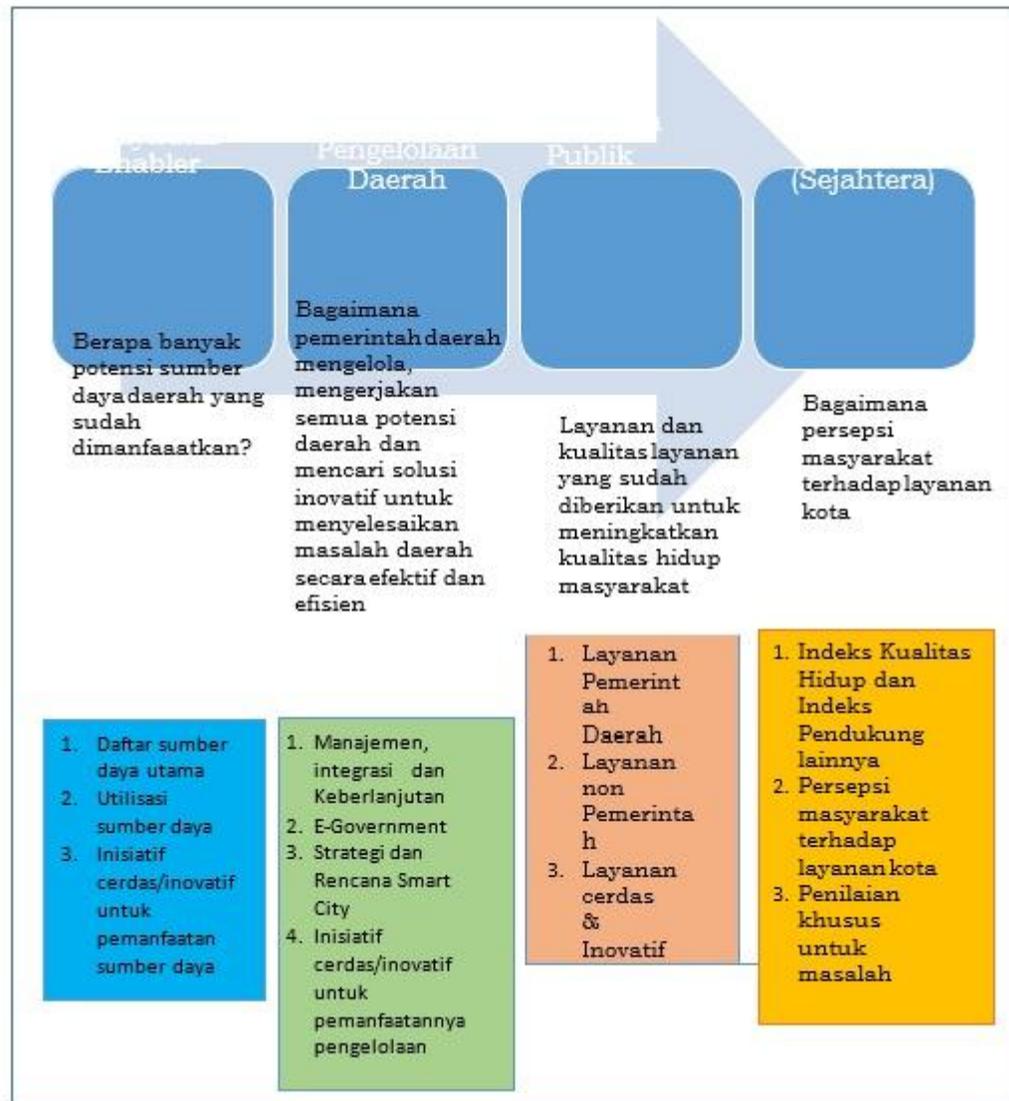
Kabupaten Pati baik di sisi pemerintahannya dan stakeholdernya secara efektif, efisien, terintegrasi, berkelanjutan dan terukur untuk menghasilkan layanan-layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Model pengukuran sebagai kota yang dinyatakan *Smart City* dapat digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 6 Model Pengukuran

Setelah ditetapkan model pengukuran *Smart City*, selanjutnya dirumuskan tentang indikator pengukuran *Smart City* seperti skema di bawah ini:



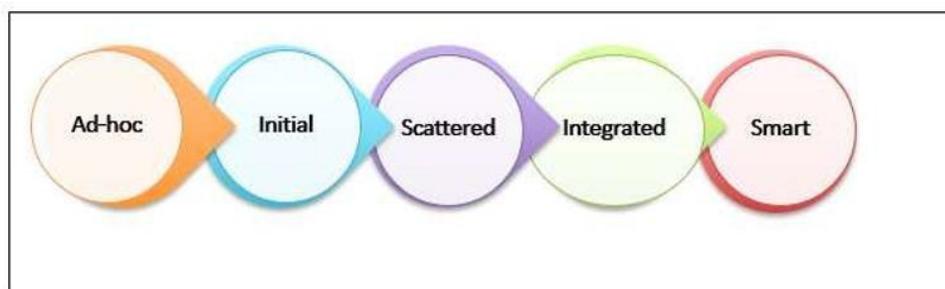
Gambar 7 Indikator Pengukuran *Smart City*

Proses selanjutnya adalah penilaian *Smart City* terhadap indikator pengukuran yang telah ditetapkan, dengan demikian tahapan penilaian dapat dilihat dari seperti skema di bawah ini:



Gambar 8 Penilaian *Smart City* Terhadap Indikator

Kematangan Kabupaten Pati sebagai kota cerdas akan dilihat dari beberapa indikator pengukuran tingkat kematangan yang dinyatakan dalam pernyataan atau tingkat kematangan (*maturity level*) seperti di bawah ini :



Gambar 9 Tingkat Kematangan *Smart City*

Tabel 16 Referensi Tingkat Kematangan *Smart City*

Level	Tingkat Kematangan	Penjelasan
1	Ad-hoc	Belum ada inisiatif <i>Smart City</i>
2	Initial	Sudah mulai ada inisiatif formal <i>Smart City</i> yang tercantum dalam rencana formal daerah, dilakukan oleh pemerintah daerah
3	Scattered	Pemerintah daerah mengajak berbagai pihak di dalam daerah untuk melakukan berbagai inisiatif <i>Smart City</i> , tetapi inisiatif-inisiatif tersebut tidak dijamin terintegrasi satu sama lain
4	Integrated	Pemerintah daerah mengajak berbagai pihak di dalam melakukan berbagai inisiatif <i>Smart City</i> yang terintegrasi, di dukung oleh forum resmi (misal: Dewan <i>Smart City</i>) yang melibatkan seluruh komponen kota, dan menyepakati rencana (formal) pengembangan <i>Smart City</i> yang memperlihatkan rencana yang terintegrasi
5	Smart	Daerah yang sudah mencapai kondisi “ <i>Integrated</i> ” dan melakukan pengukuran kinerja pencapaian target serta melakukan <i>improvement</i> program-program <i>Smart City</i>

BAB VI

PENUTUP

Di dalam dokumen Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati ini disampaikan Program Inisiatif dan kerangka kerja *Smart City* dengan fokus pada implementasi peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi dan program berkelanjutan di Kabupaten Pati.

Selanjutnya dipaparkan profil serta kondisi Kabupaten Pati saat ini yang mencakup visi dan misi, target pencapaian, kajian geografi dan demografi, struktur organisasi tata kerja perangkat daerah, serta fokus bidang strategi yang dijadikan sebagai landasan implementasi *Smart City* di Kabupaten Patidalam 6 (enam) bagian, yaitu:

1. *Smart Governance*;
2. *Smart Economy*;
3. *Smart living*;
4. *Smart Society*;
5. *Smart Branding*;
6. *Smart Environment*.

Dari informasi profil, kondisi, dan potret arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Pati, dilakukanlah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) serta analisis risiko sehingga lahirlah rekomendasi implementasi *Smart City* Kabupaten Pati dalam inisiatif untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam bentuk *Roadmap Smart City* Kabupaten Pati Tahun 2021 - 2025.

Tiap inisiatif dalam *Roadmap Smart City* Kabupaten Pati dijabarkan secara rinci sehingga bisa dijadikan sebagai panduan yang holistik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati untuk melakukan implementasi inisiatif *Smart City*.

Dokumen Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen hidup dan fleksibel yang harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati, serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati ini harus selalu selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan Pemerintah Daerah serta masyarakat Kabupaten Pati.

Pada akhirnya, dokumen Masterplan *Smart City* Kabupaten Pati ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan strategis dalam membangun *Smart City* di Kabupaten Pati selama 5 (lima) tahun ke depan.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

